

**LAPORAN PENELITIAN
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN
PERGURUAN TINGGI**



**MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN SEBAGAI UPAYA
DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI LOKAL KABUPATEN PACITAN**

Oleh:

**Drs. Muhammad Musiyam, MTP
Dr. Muhtadi
Drs. Suharjo, MS
Drs. Wijianto**

DIBIYAI DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
DENGAN SURAT PERJANJIAN NOMOR: 001/O06.2/PP/SP.ALPT/2011,
TERTANGGAL 16 JUNI 2011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
OKTOBER 2011**

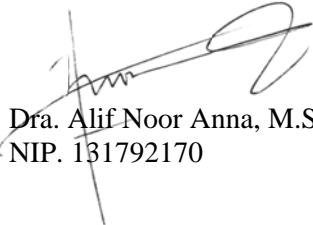
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Model Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kabupaten Pacitan
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Drs. Muhammad Musiyam, MTP
 - b. Jenis Kelamin : L
 - c. NIP : 574
 - d. Jabatan Struktural : Dosen
 - e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Geografi
 - g. Pusat Penelitian : Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - h. Alamat : Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura
 - i. Telpon/Faks : 0271-717417
 - j. Alamat Rumah : Tegalmulya I/123, Bantul, Yogyakarta 55253
 - k. Telp/Faks/E-mail : 0274-9126134
3. Lembaga Mitra : Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. DR. Wahidin No 7A, Pacitan
4. Anggota Peneliti

No	Nama Lengkap	Instansi
1	Dr. Muhtadi	LPPM UMS
2	Suharjo, MS	LPPM UMS
3	Drs. Wijianto	BALITBANGTIK Kabupaten Pacitan

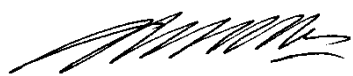
5. Pembiayaan
- a. Jumlah yang diajukan ke Dikti : Rp. 88.000.000,00
 - b. Jumlah dana yang disetujui : Rp. 82.500.000,00
 - c. Jumlah yang dibiayai oleh pihak lain
(sebutkan) : Rp -

Mengetahui,
Ketua Pusat Studi Lingkungan
Universitas muhammadiyah Surakarta


Dra. Alif Noor Anna, M.Si
NIP. 131792170

Surakarta, 1 Oktober 2011

Ketua Peneliti,



Drs. Muhammad Musiyam, MTP
NIK. 574

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Harun Joko Prayitno
NIP. 132 049 998

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah berbagai jenis sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui berbagai kebijakan, antara lain adalah dengan ditetapkannya Konsepsi Minapolitan. Konsepsi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Minapolitan didefinisikan sebagai sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian pada dasarnya Kawasan Minapolitan merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional.

Ide dasar pembangunan Minapolitan adalah penguatan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta upaya penemuan teknologi ramah lingkungan berikut instrumen-instrumen yang dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Kawasan Minapolitan dapat meliputi pengintegrasian sumber daya terkait yang mendukung, termasuk pariwisata. Di satu sisi Kawasan Minapolitan merupakan salah satu sumber daya pariwisata daerah yang mampu mendiversifikasi produk pariwisata sehingga dapat menyajikan banyak pilihan (diversifikasi) daya

tarik wisata kepada wisatawan. Di sisi lain Kawasan Minapolitan dapat terdukung oleh pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mendukung Konsepsi Minapolitan, diterbitkan pula Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, dimana dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan 197 Kawasan Minapolitan di 33 Provinsi di Indonesia dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sampai dengan tahun 2010 baru terealisasi sebanyak 41 Kawasan Minapolitan. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan, dan salah satunya adalah Kabupaten Pacitan dengan kawasan zona inti PPP Tamperan, penetapan ini sesuai hasil dari Pencanangan dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Minapolitan di Kabupaten Pacitan pada tanggal 8 Juni 2010.

Penetapan Kabupaten Pacitan sebagai Kawasan Minapolitan, didasarkan pada letak perairan Pacitan yang berhadapan langsung dengan laut Pasifik sehingga memiliki potensi beragam jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, tongkol, cakalang dan udang. Berdasarkan data di lapangan antara tahun 2009 sampai dengan 2014 Kabupaten Pacitan mempunyai target capaian produksi bidang perikanan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

**Target Capaian Produksi Bidang Perikanan Di Kabupaten Pacitan
Tahun 2009-2014**

No	Uraian	Tahun (ton)						Kenaikan (%/thn)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Laut	4.555,1	4.691,8	4.832,5	4.977,5	5.126,8	5.280,7	3%
2.	Perairan Umum	34,81	35,23	35,65	36,08	36,51	36,95	1,2 %

Balitbangtik Kab. Pacitan

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa peningkatan produk perikanan masih rendah, namun apabila dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan, masih terbuka peluang untuk dikembangkannya potensi sektor kelautan dan

perikanan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Pacitan. Hanya saja pemerintah daerah selama ini belum mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara optimal. Untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan di Pacitan.

1.2. TUJUAN KHUSUS

Kegiatan Penelitian Model Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kabupaten Pacitan ini, dilaksanakan untuk mendukung pencapaian “Sasaran dan Program Pembangunan Daerah” sebagaimana tercantum dalam “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011” khususnya bidang “Kelautan, Perikanan dan Pariwisata” dengan sasaran yaitu : “Meningkatnya potensi ekonomi sumber daya perikanan dan laut” dengan “Program : Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar” ; dan “Sasaran : Meningkatkan perusahaan objek wisata yang berbasis pada potensi sumber daya alam daerah” dengan “Program : Pengembangan Kemitraan”. Kedua bidang pembangunan tersebut di atas dapat dikembangkan secara sinergis dengan menggunakan basis sumber daya kelautan dan perikanan dengan merumuskan model dan strategi yang tepat, terarah dan jelas serta terpadu yang dapat memberikan kemanfaatan kepada seluruh *stakeholders* terkait.

1.3. URGENSI (KUTAMAAN) PENELITIAN

Berdasarkan studi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik kabupaten Pacitan, Selama ini dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di pesisir Pacitan terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : 1) Perikanan Tangkap, pada masalah ini terkait dengan aktifitas nelayan perairan Pacitan meliputi; (a) Orientasi “Mataraman” dalam pembangunan wilayah; (b) Budaya “*one day fishing*” dalam aktivitas penangkapan; (c) Keterbatasan modal dalam upaya restrukturisasi armada dan alat penangkap ikan; (d) Terbatasnya prasarana pendaratan ikan dan infrastruktur penunjang; (e) Kelestarian sumber daya ikan semakin menurun; (f) Konflik pemanfaatan *fishing ground*; (g)

Pelanggaran jalur penangkapan ikan; (h) Penggunaan bahan dan alat terlarang; (i) Regulasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terbatas. 2) Adalah berkenaan dengan pembudidayaan ikan, permasalahan yang dihadapi antara lain; (a) Belum optimalnya fungsi balai benih dan unit pembenihan rakyat; (b) Biaya produksi tinggi (harga benih dan pakan mahal); dan (c) Pasar terbatas. Dan ketiga adalah berkenaan dengan pasca panen, masalah yang ditemui adalah: (a) Bahan baku tidak kontinyu; (b) Kurangnya penguasaan teknologi penanganan pasca panen; (c) Pengawasan mutu dan bahan asal ikan belum optimal; (c) Terbatasnya pemasaran hasil olahan dan (d) Terbatasnya akses permodalan dari perbankan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah penelitian yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam bentuk/berupa “Rekomendasi Pengembangan Kawasan Minapolitan” di Kabupaten Pacitan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Di sisi lain, secara umum pengembangan Kawasan Minapolitan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang pembangunan ekonomi daerah, khususnya pengembangan ekonomi berbasis masyarakat atau ekonomi kerakyatan yang mengandalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan rumusan pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan berbagai faktor pendorong dan penghambat kunci keberhasilan baik yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman terhadap upaya pengembangan tersebut.

1.4. POTENSI LUARAN PENELITIAN

Indikator luaran dari kegiatan penelitian ini adalah “Identifikasi kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat” dan “Identifikasi kawasan minapolitan sebagai daya tarik wisata daerah”. Identifikasi kawasan minapolitan yang dimaksud terutama terkait dengan potensi dan permasalahan serta pengelolaan potensi sumber daya kelautan, perikanan dan pariwisata khususnya pada kawasan pesisir Kabupaten Pacitan. Sedangkan Keluaran dari kegiatan penelitian ini berupa “REKOMENDASI MODEL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL” di Kabupaten Pacitan, berwujud “Laporan Akhir dan Executive Summary” hasil penelitian sebanyak 1 (satu) dokumen dan diterbitkan dalam jurnal Forum Geografi Universitas muhammadiyah Surakarta, yang telah terakreditasi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam kegiatan penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut: (1) Teridentifikasinya permasalahan pengembangan bidang perikanan-kelautan di kawasan minapolitan Kabupaten Pacitan; (2) Teridentifikasinya potensi fisik, ekonomi, dan sistem pusat-pusat kegiatan minapolitan di Kabupaten Pacitan; (3) Situasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pengembangan minapolitan di Kabupaten Pacitan; (4) Tersusunnya rencana pola pemanfaatan ruang dan kawasan terutama pada pesisir perairan Pacitan dan sekitarnya yang dapat mendorong pemberdayaan UMKM khususnya usaha pengolahan ikan di Kabupaten Pacitan; (5) Teridentifikasinya area strategis dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan; (6) Model dan strategi pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Pacitan.

BAB II STUDI PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir

Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Kearah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri *et al.*, 1996).

Menurut Dahuri *et al.* (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*). Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-to-day management*). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.

2.1.2. Pengertian dan Definisi Kawasan Minapolitan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010, Minapolitan didefinisikan sebagai sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian pada dasarnya Kawasan Minapolitan merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional.

2.1.3. Peran Sektor Kelautan dalam Pembangunan

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan, sejak PELITA VI rejim Orde Baru. Sebelum itu pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sumberdaya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai potensi yang sangat besar, terutama hutan. Namun setelah hutan ditebang habis dan sumber minyak dan gas bumi baru sulit ditemukan didaratan, maka barulah pemerintah Orde Baru mulai berpaling kepada sektor kelautan.

Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan 5,8 juta km² laut atau sebesar 70% dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dari besarnya keanekaragaman hayati, potensi budidaya perikanan pantai, laut dan pariwisata bahari. Tetapi sayangnya baru sebagian kecil saja potensi yang dimanfaatkan.

Menurut Budiharsono (2001), rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan yang sedemikian besar terutama disebabkan oleh: (1) pemerintah dan masyarakat masih mengutamakan eksploitasi daratan; (2) teknologi eksploitasi dan eksplorasi lautan memerlukan tingkat teknologi yang tinggi; (3) kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam sektor kelautan relatif masih rendah, khususnya di perikanan tangkap; (4) introduksi teknologi baru dalam perikanan

tangkap, tidak terjangkau oleh nelayan yang kondisi sosial ekonominya rendah; dan (5) system kelembagaan yang ada belum mendukung pada pengembangan sektor kelautan. Rendahnya pemanfaatan sektor kelautan tersebut tercermin dari rendahnya sumbangan sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan 1993, yaitu pada tahun 1995 baru sebesar 12,83% (Budiharsono dan Kusumastanto, 1999 dalam Budiharsono, 2001).

2.1.4. Pengertian Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat

a. Pengelolaan Pesisir Terpadu

Menurut Sain dan Kreth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis.

b. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

c. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya (Nurmalasari, 2001). Di Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini merupakan rangkaian penelitian yang telah dilakukan secara bertahap. Penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah berjudul Pemberdayaan UMK bagi Masyarakat Nelayan Guna Mendukung Pengembangan Wilayah Pesisir di Kabupaten Pacitan (2008) diperoleh hasil pembangunan perikanan tangkap menuju ke depan perlu dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang memiliki peran dalam ruang lingkup kebijakan pembangunan secara umum antar lembaga; 2. mengingat nelayan sangat bergantung kepada sarana dan prasarana serta alat penangkapan ikan, maka peran koperasi di masing-masing TPI harus lebih ditingkatkan. di samping itu, perlu dorongan kuat dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan agar nelayan di masing-masing TPI segera membentuk dan memfungsikan koperasi untuk mendukung aktifitas dan kepentingan nelayan; 3. karena bakul sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nelayan, maka perlu melibatkan bakul dalam setiap program pemberdayaan agar menjadi mitra nelayan yang mempunyai kedudukan seimbang dalam menentukan harga ikan hasil tangkapan.

Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi (Rustiadi, 2001). Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh *rent* lokasi (*locational rent*), setidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni: *ricardian rent*, *environmental rent* dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (*suitability*) untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya penyeimbang lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu. Didalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan (Dahuri *et al*, 2001) yaitu; pendekatan struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) Basis ekonomi (*economic base*) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaharui (*domestic renewable resources*), (2) Memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perkembangan sektor- sektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) Efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan

dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (*inter and inter-regional interaction*) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan (5) Terjadinya learning process secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (1998), mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal, berkelanjutan dan andal, salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya. Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan adalah: (1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. (2) Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. (3) Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di lapangan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu melalui pengamatan (observasi), wawancara, diskusi kelompok terarah dan pencatatan terhadap data-data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian.

3.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir dan lautan yang memiliki potensi pengembangan minapolitan, khususnya pada kawasan zona inti PPP Tamperan dan sekitarnya di Kabupaten Pacitan, selama 1 (satu) tahun mulai bulan Mei 2011 sampai dengan Mei 2012.

3.3. OBJEK PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini akan difokuskan pada identifikasi potensi dan permasalahan yang menyangkut pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan daerah guna bahan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan minapolitan khususnya pada kawasan zona inti PPP Tamperan dan sekitarnya di Kabupaten Pacitan.

3.4. PENDEKATAN

1. Pendekatan Sinergisitas Kebijakan Tata Ruang

Pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan digunakan sebagai dasar (landasan) guna merumuskan Model Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kabupaten Pacitan agar sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan.

2. Pendekatan Perwilayahan Komoditas Sektor Perikanan dan Kelautan

Untuk memperoleh akurasi penetapan komoditas unggulan sektor perikanan dan kelautan maupun potensi wisata pada kawasan pesisir Pacitan, dilakukan identifikasi komoditas dan potensi unggulan dengan studi deskriptis serta analisis kuantitatif menggunakan pendekatan kontribusi sektoral hasil perikanan Kabupaten Pacitan. Hasil analisis tersebut dikaji kesesuaiannya dengan geostrategis (analisis spasial), dan disajikan dalam bentuk peta komoditas unggulan dan peta kawasan sentra produksi komoditas perikanan – kelautan serta peta kawasan potensi wisata di wilayah pesisir Pacitan

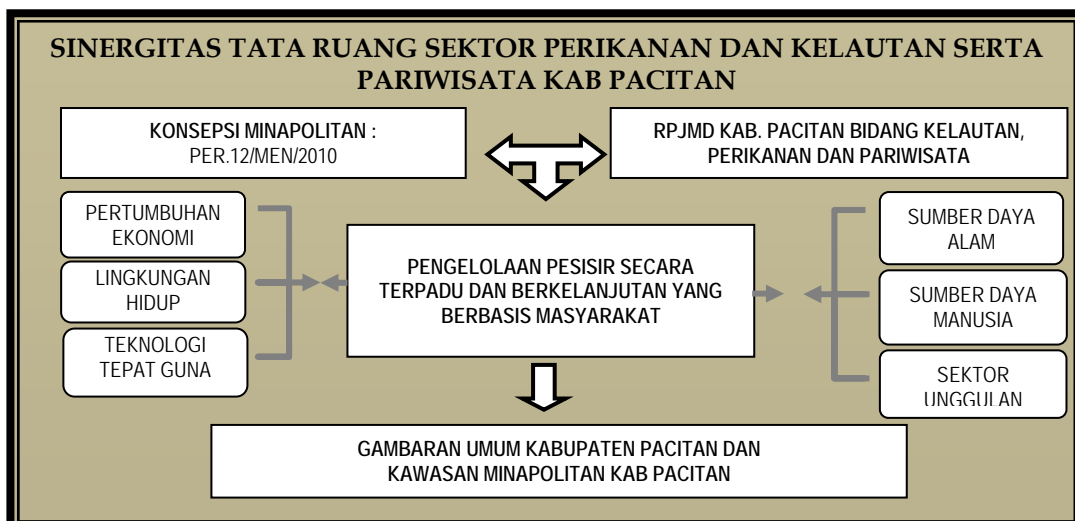
3. Pendekatan Sistem kawasan

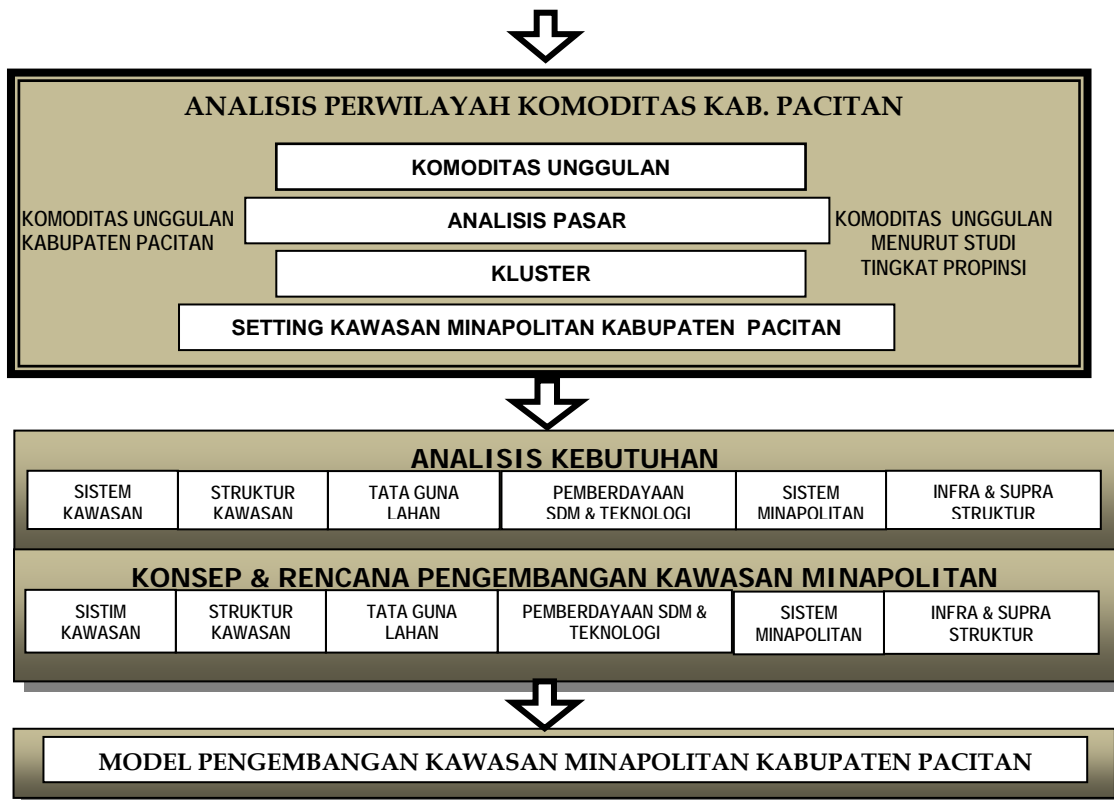
Berdasarkan data primer tentang tipologi desa-desa pembentuk kawasan Minapolitan terpilih maka dilakukan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan Minapolitan dan desa-desa hinterland-nya (merupakan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Minapolitan dalam SK Bupati Pacitan nomor 188.45/25/408.21/2011 dan 188.45/25/408.21/2011). Keterkaitan antar komponen pembentuk Kawasan Minapolitan yang meliputi ruang/kawasan, struktur kawasan, tata guna lahan, sistem minabisnis, pemberdayaan SDM dan teknologi serta infrastruktur dan suprastruktur didesain sebagai suatu sistem Kawasan Minapolitan.

3.5. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Pacitan





3.6. METODE PENGUMPULAN DATA

1) Identifikasi Lokasi Minapolitan Kabupaten Pacitan

Dalam menetapkan suatu wilayah atau kawasan untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan, perlu memperhatikan:

- Penetapan atau kebijakan kabupaten tentang tata ruang pengembangan kawasan pesisir dalam arti luas yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA), dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- Memilih kawasan dengan standar dan norma tertentu (teoritis) baik dilihat dari segi potensi atau kemampuan sumber daya maupun dukungan kelembagaan dan infrastrukturnya;
- Aspirasi *stakeholder* pada saat perencanaan.

2) Identifikasi Potensi dan Masalah Pada Kawasan Minapolitan Terpilih

Identifikasi potensi pada Kawasan Minapolitan dilakukan sebagai dasar untuk menginventarisasi masalah-masalah yang ada di kawasan tersebut. Hasil survei

kemudian dianalisis, sehingga kesimpulannya dapat menjawab atau menggambarkan, tentang:

- a. Keadaan sumberdaya fisik Kawasan Minapolitan terpilih
- b. Keadaan sumberdaya perikanan pada Kawasan Minapolitan terpilih
- c. Keadaan sumberdaya manusia, kelembagaan masyarakat nelayan dan industri hasil perikanan pada kawasan minapolitan terpilih
- d. Keadaan sarana dan prasarana umum dan sosial minapolitan terpilih
- e. Keadaan sosio-ekonomi dan sosio-budaya minapolitan terpilih

Data dan informasi dari analisis hasil survei ini merupakan bahan bagi penyusunan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan.

3.7. METODA ANALISIS

Analisis terdiri dari Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif.

1) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif utamanya dilakukan untuk mengklasifikasikan potensi wilayah. Analisis dengan mendasarkan pada hasil *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh kajian yang mendalam tentang kondisi riil dilapangan dilakukan pada setiap daerah analisis sebagai dasar kekuatan medan dan analisis indikasi program pada lokasi pusat maupun kawasan pendukung Minapolitan.

A. Analisis Kebijakan Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan

Analisis kebijakan dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang diberlakukan dalam pengembangan kawasan Minapolitan Pacitan, sebagai langkah awal dalam menetapkan model dan strategi pengembangan kawasan, terutama sektor perikanan di Pacitan agar terjadi sinergisitas antara kebijakan dan program yang direkomendasikan.

B. Analisis Desa Pusat Pertumbuhan Minapolitan

Analisis Desa Pusat Pertumbuhan Minapolitan dilakukan berdasarkan data hasil survei dan diperkuat dengan data sekunder yang ada (kabupaten dalam angka dan kecamatan dalam angka). Analisis ini dilakukan dalam rangka identifikasi profile

Kawasan Minapolitan, terdiri dari: Analisis Tipologi Pusat Pertumbuhan Kawasan Minapolitan, Analisis skala ekonomi dan pelayanan sosial ekonomi per kecamatan, Analisis Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar dan penunjang pada kawasan Minapolitan dan kawasan pendukungnya.

2) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis perwilayah komoditas dengan pendekatan model kontribusi sektoral yang diinduksi dengan analisis pertumbuhan komoditas sebagai dasar penetapan komoditas unggulan yang sustainable. Sedangkan analisis kuantitatif lain adalah analisis Sistem Informasi Geografis (*SIG*), *SIG* adalah sistem komputer yang mempunyai kemampuan pemasukan, pengambilan, analisis data dan tampilan data geografis yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Geografis dirancang untuk secara efisien memasukkan, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisa dan menyajikan semua jenis informasi yang berorientasi geografis (ESRI, 1990). Perencanaan spasial atau keruangan di wilayah pesisir lebih kompleks dibandingkan dengan perencanaan spasial di daratan (Dahuri, 1997), karena (1) perencanaan di daerah pesisir harus mengikutsertakan semua aspek yang berkaitan baik dengan wilayah daratan maupun lautan, (2) aspek daratan dan lautan tersebut tidak dapat dipisahkan secara fisik oleh garis pantai. Kedua aspek tersebut saling berinteraksi secara terus menerus dan bersifat dinamis seiring dengan proses-proses fisik dan biogeokimia yang terjadi, (3) bentang alam daerah pesisir berubah secara cepat bila dibandingkan dengan wilayah daratan. Secara praktis penerapan *SIG* untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan adalah (1) Konsep pembangunan Basis data, (2) Penentuan Ketersediaan Wilayah Pesisir (*Coastal Use Availability*), dan (3) Penentuan Wilayah pesisir untuk pengembangan.

Sebagai contoh dalam pembuatan model *SIG* untuk pariwisata memisahkan analisis untuk bagian darat dengan parameter: kelas lereng, ketinggian, sumberdaya air, penutupan lahan, aman bencana, yang kesemuannya disusun menurut derajat pengaruhnya pada suatu perlakuan tertentu (Tim Kerja Survey Dasar Sumber Alam Laut, 1995).

3.8. TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan; Pertama; mengidentifikasi potensi pada daerah yang telah ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan, tahapan ini dilakukan oleh peneliti dari LPPM UMS bersama dengan peneliti dari BALITBANGTIK Kab. Pacitan; kedua, Menganalisis ketersediaan fasilitas pendukung pengembangan minapolitan pada kawasan Minapolitan, tahapan ini dilakukan oleh peneliti dari BALITBANGTIK Kab. Pacitan, sebagai penyelenggara pada pemerintahan setempat; tahapan ketiga adalah Menganalisis situasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pengembangan minapolitan, dilakukan oleh peneliti dari LPPM UMS dengan dukungan data dari Pemkab. Pacitan; keempat Mengeksplorasi potensi riil minapolitan pada kawasan zona inti PPP Tamperan dan sekitarnya yang dapat mendorong pemberdayaan UMKM khususnya usaha pengolahan ikan di Kabupaten Pacitan, dilakukan oleh peneliti dari BALITBANGTIK Kab. Pacitan bersama dengan peneliti dari LPPM UMS, kelima, adalah Menganalisis arah pengembangan minapolitan, tahap ini dilakukan oleh Peneliti dari LPPM UMS; dan keenam adalah merumuskan model dan strategi pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Pacitan, tahapan ini dilakukan oleh BALITBANGTIK Kab. Pacitan bersama dengan LPPM UMS, melalui FGD.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan lokasi Kawasan Minapolitan merupakan implementasi pola tata ruang Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu diperlukan suatu identifikasi lokasi Kawasan Minapolitan Kabupaten Pacitan yang komplementer dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Kecuali aspek tata ruang, aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan Kawasan Minapolitan antara lain adalah: kondisi riil basis kegiatan Perikanan, daya dukung yang potensial dalam pengembangan sektor perikanan dalam arti luas serta nilai strategis dalam aksesibilitas yang dimiliki kawasan tersebut.

Pada bab ini, akan diuraikan analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai landasan permodelan pengembangan kawasan Minapolitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Pacitan. Analisis kualitatif akan menjelaskan kebijakan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pacitan. Dengan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, terutama pengembangan sektor perikanan, maka diharapkan diperoleh gambaran tentang prioritas-prioritas kawasan yang potensial dalam implementasi konsep Minapolitan. Sedangkan analisis kuantitatif menekankan pada pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pacitan dengan pendekatan berbasis komoditas. Sesuai dengan pola pendekatan tersebut maka dilakukan analisis untuk menetapkan komoditas potensial, dan andalan. Oleh karena keterbatasan data pada tingkat desa, maka penetapan komoditas potensial, andalan, dan unggulan dilakukan dengan data BPS pada tingkat wilayah Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk mengetahui kontribusi sektor perikanan berdasarkan kawasan dilakukan analisis kontribusi sektoral dengan unit analisis per Kecamatan sebagai dasar penetapan kawasan pengembangan Minapolitan Pacitan. Hasil tersebut dikombinasikan dalam analisis keruangan melalui pendekatan sistem informasi geografi untuk melihat secara spasial letak dan lokasi dari masing-masing wilayah secara geografis. Selanjutnya agar diperoleh akurasi dalam tahapan-tahapan penelitian, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan kunci yang meliputi perangkat

desa, nelayan setempat maupun dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan.

4.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PACITAN

4.1.1. KONDISI GEOGRAFIS

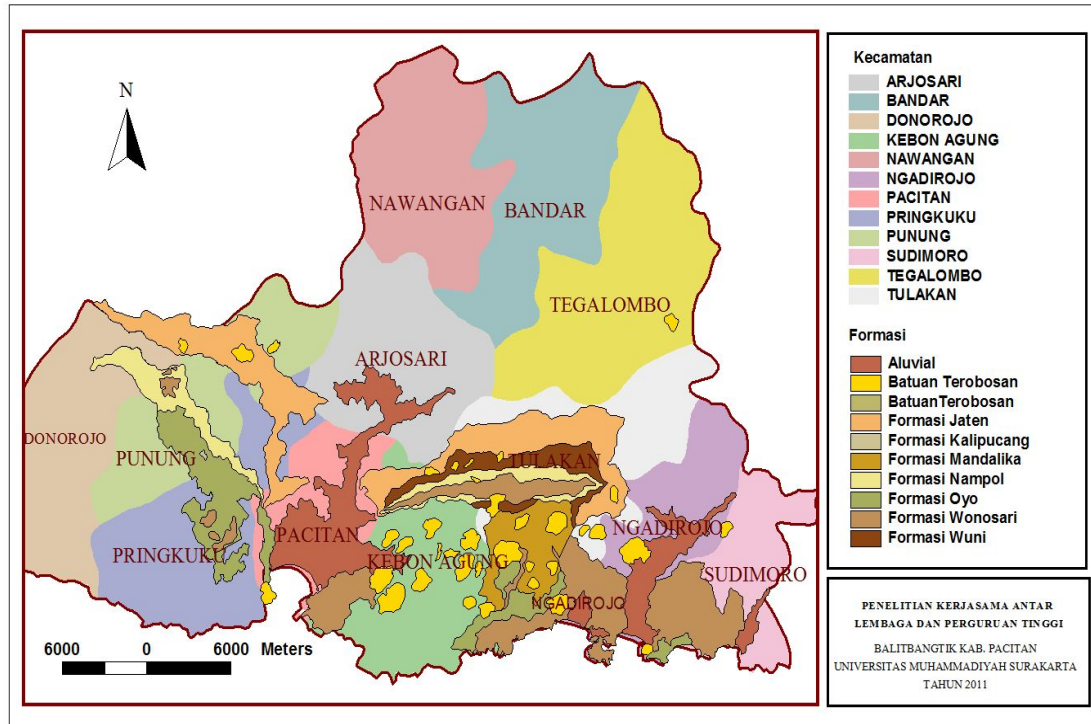
Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Terletak diantara $7,55^{\circ}$ – $8,17^{\circ}$ Lintang Selatan dan $110,55^{\circ}$ – $111,25^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan dengan batas daerah meliputi : Sebelah utara Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah timur Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah barat Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Luas Kabupaten Pacitan **1.389,8716 Km²**, sebagian besar berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa. Secara keseluruhan, daerah Pacitan merupakan daerah yang bergelombang (sekitar 88 %). Gunung tertinggi adalah Gunung Limo yang terletak di Kecamatan Kebonagung dan Gunung Gembes di Kecamatan Bandar. Gunung Gembes sekaligus merupakan mata air dari Sungai Grindulu.

Secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Potensi yang dimiliki cukup beragam mulai dari potensi kelautan, potensi pesisir dan potensi untuk pengembangan budidaya ikan di wilayah darat. Perbandingan keadaan lapangan secara keseluruhan, terdiri dari; (1) datar (kelas kelerengan 0 – 5 %) 55,59 Km² pada 4 %; (2) berombak (kelas kelerengan 6 – 10 %) 138,99 Km² pada 10 %; (3) Bergelombang (kelas kelerengan 31 – 50 %) 722,73 Km² pada 52 %; (4) Bergunung (kelas kelerengan 51 % lebih) 138,99 Km² pada 10 %. Keadaan daerah Kabupaten Pacitan di bagian Selatan pada umumnya berupa batu kapur, sedangkan belahan utara berupa tanah. Adapun kandungan tanahnya terdiri dari asosiasilitosal, mediteran mereh litosal, campuran tuf dan bahan vulkan, kompleks litosal kemerahan dan alifal kelabu, endapan tanah liat yang mengandung potensi bahan galian mineral, yang di dalamnya mengandung bahan tambangan antara lain : feldspar, bali clay, bentonit, phirophilit, batu bintang (batu kalsit), batu gips, phosphate, batu silical, biji besi, batu bara, dolomite, batu kapur,

kalsid, andersi/pasir besi, kaolin, batu hias, timah hitam, mangaan dan sirtu. Klasifikasi tersebut ditunjukkan dalam gambar 4.1. sebagai berikut:

Gambar 4.1 Peta Geologi

KABUPATEN PACITAN



Sumber : Data diolah

Kabupaten Pacitan berdasarkan atas penggunaan tanah terdiri dari lahan sawah seluas 130,15 Km² dan lahan kering seluas 1.259,72 Km². lahan sawah menurut jenis pengairannya adalah sebagai berikut : sawah irigasi teknis pada 864 Ha; irigasi setengah teknis pada 2.130 Ha; irigasi sederhana pada 3.314 Ha dan sawah tadah hujan seluas 6.707 Ha. Untuk lahan kering menurut jenis penggunaannya adalah sebagai berikut : tanah untuk bangunan 3.153 Ha, tegal/huma 29.891 Ha, tanaman kayu-kayuan 45.214 Ha; hutan rakyat dan kebun 34.969 Ha; hutan Negara 1.214 Ha dan tanah lainnya 11.531 Ha.

Apabila dilihat dari permukaan air laut, letak ketinggian kabupaten penyebarannya sama. Kecamatan Pacitan dan Kebonagung berada pada 0 – 7 m, Kecamatan Donorojo pada 338 m, Kecamatan Punung pada 229 m, Kecamatan Pringkuku pada 357 m, Kecamatan Arjosari pada 26 m, Kecamatan Nawangan pada

668 m, Kecamatan Tulakan pada 334 m, Kecamatan ngadirojo pada 10 m dan Kecamatan Sudimoro terletak pada 9 m.

4.1.2. KONDISI PEMERINTAH, PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/Negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Pacitan sebagai salah satu kabupaten dari Propinsi Jawa Timur, mempunyai system pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Unit pemerintahan dibawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Masing-masing kecamatan terbagi habis dalam desa/kelurahan. Kabupaten Pacitan secara administrasi pemerintahan terdiri dari 12 Kecamatan, 166 Desa dan 5 Kelurahan. Lima kelurahan keseluruhan berada di Kecamatan Pacitan. Sebagai unit terkecil dari pemerintahan setiap desa mempunyai proyek pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan tersebut meliputi sarana dan prasarana dari desa yang bersangkutan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada dasarnya mempunyai tujuan pokok yaitu membangun manusia seutuhnya dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan perencanaan yang matang dengan disertai data yang akurat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Pacitan adalah sebesar 540.516 orang, yang terdiri dari 263.919 laki-laki dan 276.597 perempuan. Distribusi penduduk Pacitan terbesar berada di Kecamatan Tulakan yaitu sebesar 14,30 persen, yang diikuti oleh Kecamatan Pacitan sebesar 13,51 persen. Selanjutnya distribusi terkecil adalah kecamatan Pringkuku sebesar 5,49 persen dan Sudimoro sebesar 5,55 persen. Tulakan dan Pacitan adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 77.273 orang dan 73.020 orang. Dengan luas wilayah sekitar 1389,87 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Pacitan adalah sebesar 389 orang per km². Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pacitan, yaitu sebesar 947 orang per Km². Sementara itu, kecamatan yang paling rendah tingkat

kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pringkuku, yaitu sebesar 223 orang per km².

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pacitan per tahun selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 0,28 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Pacitan adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Pacitan, yaitu sebesar 1,36 persen. Kecamatan Kebonagung merupakan wilayah dengan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah yaitu sebesar minus 0,25 persen. Sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di bawah rata-rata kabupaten. Kecamatan Arjosari, Pringkuku, dan Tulakan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang masih positif. Empat Kecamatan lainnya yaitu : Donorojo, Punung, Nawangan, dan Kebonagung mengalami penurunan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata kabupaten ditunjukkan oleh 5 (lima) Kecamatan. Kecamatan Pacitan sebagai Ibukota Kabupaten mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi, diikuti oleh Kecamatan Ngadirojo dan Tegalombo. Sedangkan Kecamatan Bandar dan Sudimoro menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif sama.

4.1.3. DASAR HUKUM KAWASAN PERAIRAN PACITAN

Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya maupun tangkap serta wisata bahari yang prospektif. Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan atau membudidaya ikan meliputi; (a) Perairan Indonesia, (b) ZEE dan (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidaya ikan yang potensi di wilayah Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan **perairan** Indonesia sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, adalah **laut** teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut untuk Kabupaten adalah 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan pengelolaan Kabupaten hanya sebatas 4 mil laut, akan tetapi dalam pemanfaatan potensi perikanan dapat menjangkau wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif sampai dengan 200 mil laut. Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah laut sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perikanan Daerah, meliputi : (a) Ekspolarasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) Pengaturan administrasi; (c) Pengaturan tata ruang lingkup; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.(e) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; (f) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

4.1.4. POTENSI SUMBER DAYA PESISIR PANTAI PACITAN

1) Karakteristik Pantai yang ada di Kabupaten Pacitan

Kawasan pesisir di Kabupaten Pacitan memiliki banyak pantai dengan beragam tipe atau jenisnya yang membentang sepanjang 71 Km dari Kecamatan Donorejo di sebelah barat hingga Kecamatan Sudimoro di sebelah timur Kabupaten Pacitan. Adapun jenis atau tipe pantai di Kabupaten Pacitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tipe Pantai Berpasir (sandy beach)

Pantai yang berpasir hanya di daerah dimana gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Partikel yang kasar menyebabkan hanya sebagian kecil permukaannya yang menyerap bahan organik yang berukuran sangat kecil, serta yang tersedia untuk bakteri. Total bahan organik dan organisme hidup di pantai yang berpasir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jenis pantai lainnya. Sedimennya yang kasar membuat pasir tersebut tidak dapat menahan air dengan baik sehingga lapisan permukaan menjadi kering sampai

kedalaman beberapa centimeter dibagian atas pantai. Tipe pantai berpasi ini sering dijadikan tempat beberapa biota laut untuk bertelur. Panjang pantai berpasi di Kabupaten Pacitan mencapai 23,69 Km terutama di beberapa teluk, seperti Pantai Teleng Ria di Kecamatan Pacitan dan Pantai Pasir Putih di Kecamatan Pringkuku.

b. *Tipe Pantai Berbatu*

Pantai berbatu merupakan pantai yang komponen pembentuknya berupa bebatuan dan memanjang ke laut serta terbenam di air. Batu yang terbenam di air tersebut menciptakan suatu zonasi habitat karena adanya perubahan naik turunnya permukaan air laut akibat proses pasang yang menyebabkan adanya bagian yang selalu tergenang air, selalu terbuka terhadap matahari serta zona yang tergenang pada saat pasang naik dan terbuka saat pasang surut. Panjang pantai berbatu di Kabupaten Pacitan mencapai 47,640 Km, diantaranya yang paling terkenal adalah pantai Klayar.

2) **Potensi Ekosistem Wilayah Pesisir**

a. *Ekosistem Mangrove*

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika yang khas tumbuh di sekitar pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang-surut air laut. Dicitrakan oleh tanaman bakau, api-api, nipah, jeruju dan lain-lainnya. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah: (1) Sebagai tempat berlindung dan memijah biota laut; (2) Sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan; (3) Penahan abrasi angin dan gelombang laut; (4) Penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut. Potensi mangrove di Kabupaten Pacitan terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo dengan luas mencapai 2 Ha dan diteluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan yang luasnya mencapai 5 Ha. Jenis mangrove yang terbesar adalah *Avicenia sp* dan *Rhizophora sp* yang merupakan hasil penanaman. Hutan mangrove yang ada di Kabupaten Pacitan secara umum kondisinya bagus karena potensi lahan yang sesuai untuk syarat tumbuh dari tanaman mangrove relatif sempit dan selain itu kesadaran dari warga masyarakat akan fungsi hutan mangrove masih sangat kurang.

b. *Ekosistem Terumbu Karang*

Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di daerah tropis, terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem yang lainnya demikian pula keanekaragaman hayatinya. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang, alga, teripang dan kerang mutiara. Hal ini disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan nutrisi dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan dari luar. Dari segi estetika, terumbu karang yang masih utuh menampilkan pemandangan yang sangat indah, jarang dapat ditandingi oleh ekosistem lainnya. Tipe terumbu karang mencakup beberapa jenis, yaitu terumbu karang tepi (*fringing reefs*), terumbu karang penghalang (*barrier reefs*), terumbu karang cincin (*atoll*) dan terumbu karang tambalan (*patch reefs*). Terumbu karang di Kabupaten Pacitan luas keseluruhan mencapai 11,51 Ha yang menyebar di beberapa lokasi yaitu: (1) Pantai Srau dengan luas sekitar 3,04 Ha; (2) Pantai Watukarung luas sekitar 1,21 Ha; (3) Pantai Kalayar luas sekitar 1,21 Ha; (4) Teluk Siwil luas sekitar 2,12 Ha; dan (5) Tanjung Tiang Centakan luas sekitar 3,39 Ha.

c. *Ekosistem Padang Lamun*

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir. Sama halnya dengan rerumputan daratan, lamun juga membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih dijangkau oleh sinar matahari. Padang lamun sering terdapat di perairan laut hidup antara rawa mangrove dan terumbu karang. Fungsi ekologis padang lamun di lingkungan pesisir antara lain: (1) Dapat menstabilkan dasar laut sekaligus sebagai perangkap sedimen; (2) Sebagai sumber makanan bagi biota laut lainnya; (3) Merupakan habitat bagi bermacam-macam ikan dan udang; (4) Sebagai pelindung yang menutupi penghuni padang lamun dari sengatan sinar matahari. Potensi padang lamun di Kabupaten Pacitan terletak di Pantai Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo luasnya mencapai 4 Ha dan juga wilayah Srau. Jenis tanaman yang ada adalah *Enhalus*.

d. *Ekosistem Rumput Laut Alami*

Rumput laut hidup pada perairan yang memiliki substrat keras yang kokoh untuk tempat melkat. Eksosistem rumput laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penetrasi sinar matahari, suhu salinitas dan arus. Rumput laut terdapat di daerah *mid-interdal* sampai kedalaman 20 – 30 m. secara ekologi rumput laut mempunyai fungsi penting di daerah pesisir, yang merupakan sumber utama produktifitas di perairan dangkal yaitu: (1) Menstabilkan dasar-dasar lunak dimana kebanyakan spesies tumbuh; (2) Sebagai tempat pembesaran bagi banyak spesies yang menghabiskan waktu dewasanya di tempat lain; (3) Berperan sebagai perangkap sedimen dan selanjutnya membentuk dasar; (4) Sebagai pelindung bagi penghuni biota laut lainnya dari sinar matahari; (5) Beberapa manfaat dari rumput laut antara lain adalah untuk bahan baku di bidang industri komestik, industri farmasi dan sebagai bahan baku pokok pembuatan agar-agar. Potensi rumput laut di Kabupaten Pacitan hampir tersebar disepanjang pesisir pantai Pacitan. Hidup menempel pada karang dan batuan-batuan di sepanjang perairan pantai. Jenis rumput laut yang banyak ditemukan di Kabupaten Pacitan adalah *Gracillaria sp*, *Sargassum sp*, *Euchema sp* dan *Turbinaria sp*.

3) Potensi Sektor Perikanan Kabupaten Pacitan

Komoditas ikan yang terdapat di perairan laut Kabupaten Pacitan bermacam-macam mulai jenis ikan pelagis besar seperti ikan Tuna dan Cakalang, pelagis kecil seperti ikan Kembung dan ikan Lemuru, demersal seperti ikan Pari maupun jenis udang-udangan (*Crustacea*) seperti Lobster, Rajungan dan lain-lain. Potensi pesisir yang dimiliki wilayah Kabupaten Pacitan cukup menjanjikan dimana panjang pantai mencapai hampir 71 km dengan luas sampai 4 mil laut mencapai 523,82 Km², membentang melewati 7 kecamatan dari Kecamatan Sudimoro sampai dengan Kecamatan Donorojo. Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir Pacitan meliputi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, rumput laut alami dan pasir putih yang merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Jenis ikan yang mendominasi wilayah pesisir ini adalah jenis ikan-ikan karang, *Crustaceae* (udang dan lobster) serta ikan hias.

Kegiatan perikanan budidaya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pacitan terdiri dari budidaya air tawar, air laut dan air payau. Hampir seluruh kegiatan

budidaya dikelola oleh masyarakat secara perorangan dan masih dalam usaha skala kecil. Namun kolam, antusiasme masyarakat yang semakin meningkat terhadap kegiatan budidaya ditunjang dengan ketersediaan lahan baik kolam, perairan umum maupun tambak merupakan potensi strategis untuk dikembangkan. Dalam upaya mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, juga terus dibangun balai benih ikan karena keberadaan benih merupakan mata rantai pertama dalam sektor produksi usaha budidaya ikan. Berdasarkan permintaan pasar dan potensi pengembangan komoditas utama perikanan budidaya yang dikembangkan adalah jenis udang, rumput laut, nila, ikan lele, gurame, dan ikan mas.

4) Luas Wilayah Perairan Laut Kabupaten Pacitan

Luas keseluruhan Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8742 Km² dengan luas wilayah laut mencapai 523,82 Km². luas wilayah perairan berdasarkan wilayah kewenangan tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Perairan Berdasarkan Wilayah Kewenangan

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai		Luas Wilayah Kewenangan					
		(mil)	(km)	4 mil		12 mil		ZEE	
				(mi ²)	(mi ²)	(mi ²)	(mi ²)	(mi ²)	(mi ²)
1	Donorojo	4,52	8,371	18,08	62,01	186,04	54,24	3.100,62	904
2	Pringku	8,52	15,779	34,08	116,89	350,67	102,24	5.844,54	1.704
3	Pacitan	1,39	2,574	5,56	19,17	57,20	16,68	953,41	278
4	Kebonagung	10,17	18,835	40,68	139,53	418,59	122,04	6.976,48	2.034
5	Tulakan	1,94	3,593	7,76	26,62	79,85	23,28	1.330,85	388
6	Ngadirojo	5,69	10,538	22,76	78,07	234,20	68,28	3.903,28	1.138
7	Sudimoro	5,95	11,019	23,80	81,63	244,89	71,40	4.081,44	1.190
TOTAL		38,18	70,79	152,72	523,82	1.571,4	458,16	16.190,62	7.636

Sumber : *Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan*

Kondisi pantai di Kabupaten Pacitan terdiri dari pantai yang landai dan curam/terjal. Perincian panjang pantai tiap kecamatan berdasarkan kondisi pantai dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Panjang Pantai Per Kecamatan Berdasarkan Kondisi Pantai

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Panjang Pantai (Km)	
			Curam	Landai
1.	Donorojo	- Sendang	4,1	0
		- Widoro	0,75	1,771
		- Kalak	1,75	0
2.	Pringkuku	- Watukarung	1	2
		- Dersono	1,5	1
		- Candi	1	2,279
		- Jlubang	1	0
		- Poko	2	0
		- Dadapan	4	0
3.	Pacitan	- Kel. Sidoharjo	0,287	1
		- Kel. Ploso	0	0.858
		- Kembang	0,3	0.129
4.	Kebonangung	- Sidomulyo	1,050	1,047
		- Wora-wari	1,970	0,124
		- Katipugal	1,076	1,016
		- Klesem	3,478	1,229
		- Karangnongko	0,953	0,616
		- Kalipelus	1,589	1,549
		- Plumbungan	1,875	1,263
5.	Tulakan	- Jetak	3,593	0
6.	Ngadirojo	- Sidomulyo	2,5	2,9
		- Hadiwarno	3,438	1,7
7.	Sudimoro	- Sumberejo	1,096	1,930
		- Sukorejo	0,895	0,750
		- Peger Lor	2,932	0
		- Pager Kidul	2,885	0,531
Kecamatan		26 desa/kel	47,017	23,692

Sumber : *Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan*

4.1.5. POTENSI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan perikanan budidaya yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan terdiri dari budidaya air tawar, air laut dan air payau. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan perikanan budidaya diarahkan kepada: (1) Pembangunan sentra budidaya air tawar; (2) Pengembangan budidaya air payau dan air laut; (3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung (seperti laboratorium, optimalisasi BBI, sarana prasarana produksi). Arah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi yang ada, kondisi sosial masyarakat pembudidaya ikan, kemampuan sumberdaya manusia baik petugas

maupun pembudidaya ikan, serta ketersediaan dana untuk mengakomodasi segala keperluan dalam rangka mencapai arah yang ditetapkan tersebut. Disamping itu, perikanan budidaya juga memperhatikan kondisi perairan umum yang akhir-akhir ini marak dengan adanya pengakapan ikan menggunakan alat dan bahan terlarang.

1) *Budidaya Air Tawar*

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Pacitan, pengembangan budidaya ikan air tawar terdapat pada daerah yang mempunyai cukup potensi air. Terdapat tiga sentra pengembangan ikan air tawar yaitu: (a) Sebelah barat : Kecamatan Punung dan Donorojo; (b) Sebelah utara : Kecamatan Arjosari dan Tegalombo; (c) Sebelah timur: Kecamatan Ngadirojo. Luas kolam budidaya mencapai 165.517 m² yang tersebar di dua belas kecamatan se-Kabupaten Pacitan, lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Luas Kolam Budidaya per Kecamatan di Kabupaten Pacitan

No.	Kecamatan	Luas Kolam (m ²)
1.	Donorojo	6.265
2.	Punung	13.300
3.	Pringkuku	7.000
4.	Pacitan	29.270
5.	Arjosari	8.557
6.	Nawangan	5.070
7.	Bandar	5.290
8.	Tegalombo	7.130
9.	Kebonagung	7.265
10.	Tulakan	8.630
11.	Ngadirojo	12.022
12.	Sudimoro	1.383
Jumlah		111.182

Sumber : *Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten*

Untuk mendukung kegiatan budidaya air tawar pemerintah menyediakan Balai Benih Ikan (BBI) seluas 1 hektar. Balai tersebut terletak di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pacitan dengan menempatkan dua orang petugas teknis. Lokasinya sangat strategis karena berada di tepi jalan raya Pacitan – Ngadirojo sehingga dapat sangat menguntungkan dalam pendistribusian benih. Sampai saat ini, produksi benih

yang dihasilkan terdiri dari benih Nila \pm 210.000 ekor/tahun, Tombro \pm 90.000 ekor/tahun dan pada tahun 2007 baru dilaksanakan pembenihan Lele dengan produksi \pm 50.000 ekor/tahun.

2) *Budidaya Air Payau*

Usaha budidaya air payau diupayakan melalui budidaya di tambak, dimana jenis-jenis yang telah berhasil dibudidayakan adalah Bandeng, Udang Windu dan Udang *Vanname*. Jenis udang yang dibudidayakan sampai dengan tahun 2004 adalah Udang Windu, sedangkan tahun 2005 sampai tahun 2008 adalah Udang *Vanname*, dengan produksi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Kabupaten Pacitan

No.	Tahun	Jumlah Produksi (Kg)
1.	2002	38.919
2.	2003	19.735
3.	2004	29.000
4.	2005	60.000
5.	2006	Tidak tebar
6.	2007	67.960
7.	2008	47.200

Sumber : Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 2008

Budidaya bandeng di tambak telah dirintis berupa demplot yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pacitan. Demplot seluas 1 hektar yang berlokasi di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan. Produksi yang telah dicapai rata-rata sekitar 1.750 kg setiap kali panen. Potensi tambak bandeng juga terdapat di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku.

3) *Budidaya Air Laut*

Wilayah perairan laut Kabupaten Pacitan juga mempunyai potensi bagi pengembangan usaha budidaya laut yaitu Teluk Segoro Anakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo yang saat ini dirintis untuk dikembangkan usaha pembesaran lobster dalam keramba. Selain budidaya perikanan laut, Laut Pacitan juga mempunyai potensi rumput laut. Rumput laut alami terdapat di sebagian pantai di wilayah Kecamatan Donorojo, Pringkuku dan Kebonagung yang tumbuh hampir disepanjang pantai berkarang. Pengembangan rumput laut melalui sistem budidaya

dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo, khususnya di Teluk Segoro Anakan. Jenis yang dikembangkan adalah *Eucheuma Cottonii*, sampai saat ini produksinya mencapai 35.831 ton/tahun. Hal ini didasarkan pada kondisi pantai yang terletak dalam teluk, sehingga ombak laut tidak terlalu besar.

4.1.6. INDUSTRI PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

Sektor industri yang dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah sektor industri penyedia sarana perikanan dan pemanfaatan hasil perikanan. Jenis industri yang dibutuhkan adalah berupa pabrik es, pabrik kapal/perahu dan industri hasil perikanan. Pabrik es di Kabupaten Pacitan ada dua buah yaitu di Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Pacitan, walaupun dengan skala yang masih terbatas dan hanya mampu mensuplai es kepada nelayan. Sedangkan kebutuhan es lainnya didatangkan dari daerah Solo, karena produksi hasil perikanan di Kabupaten Pacitan cukup tinggi. Pabrik kapal/perahu yang ada di Kabupaten Pacitan, khususnya kapal fiber telah berkembang di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung, dimana produksi yang dihasilkan berupa perahu fiber dengan berbagai ukuran mulai dari type perahu jukung sampai dengan ukuran perahu 10 GT. Sedangkan industri pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang di Kabupaten Pacitan antara lain adalah produk terasi, kripi ikan, pengeringan ikan, abon ikan, rumput laut dan lain-lain. Terasi merupakan produk olahan yang memiliki skala produksi paling besar diantaranya produk lainnya. Seluruh industri pengolahan tersebut berupa industri rumah tangga dan saat ini telah terkonsentrasi di Desa Simoboyo dan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan.

4.1.7. PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

Penanganan pasca panen hasil perikanan masih jarang dilakukan di Kabupaten Pacitan. Produksi ikan hasil tangkapan nelayan kebanyakan dijual langsung dalam bentuk segar. Pasar ikan di sekitar tempat pendaratan ikan belum tersedia, yang ada hanyalah bakul ikan yang membeli di TPI kemudian dijual kepada pedagang pengepul atau di pasar. Selanjutnya pengepul akan menjualnya dalam keadaan segar ke daerah lain seperti : Surabaya, Tuban, Kediri, Malang, Jember, Semarang dan Cilacap. Jenis-jenis hasil laut yang biasa dipasarkan meliputi lobster, bawal, manyung, remang, tongkol dan juga rumput laut.

Unit pengolahan yang sudah ada adalah pembuatan terasi dengan bahan baku ikan rebon dan berlokasi di Desa Sironoboyo dan Desa Kembang Kecamatan Pacitan. Produk terasi Pacitan dipasarkan ke daerah Tuban, Semarang, Jember dan Solo tanpa kemasan karena kemampuan pengusaha lokal Pacitan untuk teknis pengemasan belum memenuhi permintaan pasar. Selain terasi, unit pengolahan hasil perikanan yang lain adalah pengasinan/pengeringan, pengasapan, pembuatan abon ikan dan keripik ikan namun dalam jumlah yang masih relatif kecil dan dipasarkan lokal di Kabupaten Pacitan.

Tabel 4.5

Ketersediaan Produksi Ikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2007 – 2008

URAIAN	Tahun	
	2007	2008
1. Perikanan Darat :		
- Penangkapan	282.600 kg	273.640 kg
- Budidaya Air Tawar	41.555 kg	115.183 kg
- Budidaya Air Payau	67.960 kg	47.200 kg
2. Perikanan Laut		
- Penangkapan	3.114.661 kg	3.438.470 kg
- Budidaya	27.200 kg	35.831 kg
3. Total :		
- Pengakapan	3.397.261 kg	3.712.110 kg
- Budidaya	136.715 kg	198.214 kg
4. Pemanfaatan :		
- Konsumsi	1.658.258 kg	1.810.479 kg
- Eksport	1.819.000 kg	2.037.280 kg
- Non konsumsi	56.718 kg	62.565 kg
5. Jumlah Penduduk Pacitan	555.262 orang	555.262 orang (keadaan th. 2007)
6. Konsumsi Ikan	9,95 kg/kapita/tahun	99,9 kg/kapita/tahun

Sumber : Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 2008

4.1.8. KONDISI NELAYAN PACITAN

Menurut DKP Pacitan, nelayan di Pacitan terbagi dalam empat jenis. *Pertama*, nelayan perorangan yang berjumlah 2.735 orang; *kedua*, nelayan yang menggunakan perahu tidak bermesin berjumlah 12 orang; *ketiga* nelayan yang menggunakan perahu bermesin <1 GT berjumlah 921 orang dan *keempat*, nelayan yang menggunakan perahu bermesin >1 GT berjumlah 78 orang.

Tabel 4.6

Klasifikasi Nelayan Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Kelompok Nelayan			
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama
Donorojo	5	89	16	5
Punung	9	61	36	-
Pringkuku	29	39	28	1
Pacitan	-	52	25	2
Kebonagung	36	74	14	-
Arjosari	24	48	24	1
Nawangan	-	54	23	2
Bandar	11	87	15	-
Tegalombo	15	38	13	1
Tulakan	-	33	56	4
Ngadirojo	-	61	54	3
Sudimoro	24	34	5	-
Jumlah Total	153	670	309	19
Tahun 2006	26	647	315	20
Tahun 2005	34	696	248	16
Tahun 2004	48	712	219	7
Tahun 2003	250	592	128	5
Tahun 2002	250	592	128	5

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

4.2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.2.1. Analisis Kebijakan Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan

Konsepsi Minapolitan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP/32MEN/2010, menerangkan bahwa pembangunan sektor ekonomi memprioritaskan sektor perikanan sebagai dasar pengembangan wilayah. Perencanaan tata ruang yang bertumpu pada kegiatan perikanan diharapkan mendukung terwujudnya ruang budidaya, ruang pabrik pengolahan ikan, serta ruang pelayanan dan pemberdayaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Rencana pengembangan wilayah perikanan dengan tata ruang yang berorientasi pada kepentingan efisiensi dan keefektifan sektor perikanan diharapkan mampu mendorong terwujudnya kekuatan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, berkeadilan, mandiri, modern, berdaya saing dan berwawasan lingkungan merupakan konsep yang ideal karena harus dilaksanakan secara *bottom up serta* sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang otonomi daerah.

Seiring dengan keluarnya surat keputusan pengesahan konsepsi minapolitan dimana Kabupaten Pacitan termasuk salah satu diantara wilayah yang diprioritaskan menjadi kawasan minapolitan, Bupati Pacitan mengeluarkan SK dengan nomor 188.45/25/408.21/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan. Dalam SK tersebut dijabarkan wilayah-wilayah yang mejadi subyek minapolitan. Berdasarkan SK Bupati Pacitan nomor 188.45/25/408.21/2011 dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pacitan yang termaktub dalam Perda Kab. Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, konsepsi minapolitan di kabupaten Pacitan terbagai menjadi tiga kawasan yaitu kawasan inti dengan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan, kedua adalah kawasan pendukung PPP Tamperan yang meliputi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Pantai Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo dan TPI Pantai Watukarung Kecamatan Pringkuku, dan Ketiga adalah kawasan pengembangan perikanan tangkap yang meliputi: Pantai Sumberejo Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro; Pantai Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan; Pantai Bagelon Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung; Pantai Wawaran Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung; pantai Kaliuluh Desa Klasem Kecamatan Kebonagung; Pantai Bakung Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung; Pantai Pantai Tawang Desa Katipugal Kecamatan Kebonagung; Pantai Padidangkal Desa Worawari Kecamatan Kebonagung; Pantai Srengit Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung; Pantai Klayar Desa Sendang Kecamatan Donorojo. Penerapan Konsepsi Minapolitan di Kabupaten Pacitan tidak hanya bertumpu pada sektor perikanan tangkap saja, melainkan didukung pula oleh sektor perikanan budidaya serta industri berbasis perikanan. Adapun Kawasan pendukung lain yang ditetapkan dalam SK Bupati ini adalah Kawasan Pengolahan hasil Perikanan yang meliputi: Kecamatan Pacitan, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Sudimoro, serta Kawasan Perikanan Budidaya prioritas komoditi ikan lele yaitu; Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung, dan Kawasan Perikanan Budidaya Pendukung Pengembangan Komoditi Ikan Nila, Ikan Mas, Gurami, Udang dan Rumput Laut yaitu di Kecamatan Arjosari, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Bandar, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Sudimoro dan Kecamatan Ngadirojo.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, Kabupaten Pacitan perlu secara otonom merencanakan pengembangan bisnis sektor perikanan (minabisnis) dengan pendekatan wilayah, komoditas dan sumber daya. Berkenaan dengan komoditas perikanan yang dihasilkan sebaiknya memiliki daya saing komparatif maupun kompetitif. Pengembangan bisnis sektor perikanan dalam Kawasan Minapolitan mengutamakan keterkaitan sub sistem hulu-budidaya-hilir (*backward-forward linkage*) atau konsep minabisnis terintegrasi vertikal. Peningkatan minabisnis yang bertumpu industri perikanan di suatu kawasan sebaiknya berdasarkan konsep *commodity base*. Konsep *commodity base* menekankan pentingnya pemilihan komoditas andalan-potensial. Komoditas andalan-potensial sebagai suatu produk memiliki alternatif yang luas, baik sebagai produk primer (bahan mentah hasil panen) maupun sekunder (olahan industri perikanan). Dari uraian tersebut di atas pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Pacitan diarahkan pada:

- (a) Kebijakan perekonomian wilayah ditumpukan pada sektor perikanan;
- (b) Kebijakan pembangunan sektor perikanan diorientasikan pada pengembangan perdesaan-perkotaan dengan menggunakan strategi pengembangan Kawasan Minapolitan;
- (c) Kebijakan pengembangan kegiatan bisnis sektor perikanan diarahkan untuk menggunakan konsep atau strategi integrasi vertikal (industri sektor perikanan sebagai penggerak);
- (d) Kebijakan peningkatan nilai tambah produk primer perikanan melalui meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bisnis sektor perikanan baik dalam skala *home* industri atau industri kecil-menengah-besar;
- (e) Kebijakan peningkatan kemampuan dan produktivitas usaha nelayan maupun pembudidaya melalui optimalisasi sumber daya perikanan tanpa meninggalkan upaya kelestariannya.

4.2.2. KONDISI EKSISTING SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

1) Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Dalam survei yang telah dilakukan, saat ini Kabupaten Pacitan memiliki enam titik Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di enam kecamatan yaitu; Watukarung, Kebonagung, Donorejo, Tulakan dan Sudimoro, serta satu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang terletak di Tamperan kecamatan Pacitan. Hasil analisis GIS menunjukkan peta kawasan Minapolitan seperti dalam gambar 4.2

Gambar 4.2
Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Sumber: data diolah

Komoditas ikan yang terdapat di perairan laut Kabupaten Pacitan bermacam-macam mulai jenis ikan pelagis besar seperti ikan Tuna dan Cakalang, pelagis kecil seperti ikan Kembung dan ikan Lemuru, demersal seperti ikan Pari maupun jenis udang-udangan (*Crustacea*) seperti Lobster, Rajungan dan lain-lain. Potensi pesisir yang dimiliki wilayah Kabupaten Pacitan cukup menjanjikan dimana panjang pantai mencapai 70,709 km dengan luas sampai 4 mil laut mencapai 523,82 Km², membentang melewati 7 kecamatan dari Kecamatan Sudimoro sampai dengan Kecamatan Donorojo.

Berdasarkan pendalam dan pengamatan di lapangan, Perairan Pacitan selain dieksploitasi nelayan setempat juga oleh nelayan pendatang antara lain dari Pekalongan, Prigi hingga Sulawesi Selatan. Nelayan yang ada beroperasi di perairan Pacitan sebanyak 1.232 orang. Masyarakat Pacitan sendiri umumnya merupakan nelayan tradisional yang masih menganut sistem *one day fishing*, dan sebagian besar masyarakat lainnya bekerja menjual jasa untuk menyediakan perbekalan dan kebutuhan nelayan yang diperlukan saat akan berangkat ke laut seperti halnya makanan, solar, air bersih dan es. Kapal-kapal nelayan yang berasal dari luar Pacitan pada umumnya merupakan yang berkapasitas antara 30 GT atau lebih dan sudah dilengkapi dengan alat bantu navigasi GPS dan alat komunikasi yang memadai karena letak fishing ground yang jauh mencapai Samudera Indonesia. Berbeda halnya dengan nelayan setempat yang rata-rata hanya memiliki kapal bermotor tempel, serta hanya mengandalkan suar saja sebagai petunjuk untuk melaut, fishing groundnya pun sangat terbatas yaitu antara 4-8 mil laut.

Menurut data yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan, jenis alat tangkap yang beroperasi di perairan Pacitan adalah jaring senar (parel), payang, krendet, purse seine, pancing tonda, rawai dasar, gill net, dan hand line. Jaring senar (parel) digunakan untuk menangkap cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah 40 unit dengan hasil tangkapan 10.520 kg cakalang dan 14.401 kg tongkol. Payang digunakan untuk menangkap selar, pada bulan Juli 2009 berjumlah 23 unit. Krendet digunakan untuk menangkap lobster, pada bulan Juli 2009 berjumlah 10 unit. Purse seine digunakan untuk menangkap cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah 24 unit dengan hasil tangkapan 55.734 kg cakalang dan 34.834 kg tongkol. Pancing tonda digunakan untuk menangkap tuna/cakalang, pada bulan Juli 2009 berjumlah 131 unit dengan hasil tangkapan 101.366 kg tuna dan 77.489 kg cakalang. Rawai dasar digunakan untuk menangkap manyung, pada bulan Juli 2009 berjumlah 10 unit dengan hasil tangkapan 145 kg manyung. Gill net digunakan untuk menangkap cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah 50 unit dengan hasil tangkapan 10.520 kg cakalang dan 14.401 kg tongkol. Hand Line digunakan untuk menangkap tuna/cakalang, pada bulan Juli 2009 berjumlah 595 unit dengan hasil tangkapan 101.366 kg tuna dan 77.489 kg cakalang.

Pada alat tangkap purse seine, pengoperasiannya membutuhkan biaya yang mahal terutama jika pengoperasiannya menggunakan dua kapal. Jika hasil tangkapan hanya sedikit, maka jumlah hari dalam operasi penangkapan ditambah, dari 3-4 hari menjadi 5-6 hari hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan meminimalkan kerugian dalam pengoperasian purse seine. Alat tangkap pancing memiliki waktu pengoperasian yang lebih lama sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Daerah penangkapan merupakan area yang mempunyai stok ikan yang melimpah. Daerah penangkapan ikan di perairan Pacitan ada di sekitar teluk Pacitan hingga Samudera Indonesia dengan luas wilayah kewenangan perairan laut sebesar 523,82 km.

Beberapa tahun terakhir, nelayan menggunakan rumpon laut dalam sebagai alat bantu penangkapan dan sebagai tujuan untuk daerah penangkapan, seperti yang terdapat di pantai Watukarung, Srau, dan pantai sekitarnya. Kapal yang menggunakan rumpon adalah kapal sekoci yang memiliki berbagai macam alat tangkap dalam satu armada. Kapal purse seine juga menggunakan rumpon, namun jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan kapal sekoci. Daerah penangkapan alat tangkap rawai dasar dioperasikan sekitar 5-7 mil dari pantai pada kedalaman 100-200 m (Fitriana, 2004). Daerah penangkapan alat tangkap purse seine sudah ditentukan oleh titik-titik rumpon yang sudah dipasang. Rumpon yang digunakan berada pada koordinat 1110 08' BT dan 80 50' LS berjarak sekitar 38 mil dari pelabuhan dengan kedalaman sekitar 900 m. Rumpon kedua pada koordinat 1110 12' BT dan 80 55' LS berjarak sekitar 42 mil dari pelabuhan dengan kedalaman sekitar 1600 m. Sedangkan rumpon ketiga pada koordinat 1110 05' BT dan 80 48' LS berada pada jarak sekitar 36 mil dari pelabuhan dengan kedalaman sekitar 800m (Kurniawan, 2010). Musim penangkapan di perairan Pacitan berlangsung antara bulan Mei hingga November. Pada bulan Desember hingga bulan April nelayan banyak yang berhenti melaut karena pada bulan ini terjadi angin barat / paceklik.

Pada musim paceklik, nelayan tradisional yang melaut hanya 80%, dengan penghasilan turun drastis yaitu hanya 20%-25% dari biasanya dengan daerah penangkapan di dalam teluk Pacitan. Meskipun hasil yang diperoleh sangat turun drastis, kegiatan melaut tetap dilakukan oleh nelayan tradisional. Hal ini karena merupakan mata pencaharian yang utama bagi nelayan tradisional. Sedangkan untuk

nelayan andon tidak ada yang melaut sama sekali, hal ini atas pertimbangan faktor keselamatan dan hasil yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya operasional apabila dipaksa untuk melaut.

Luas keseluruhan Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8742 Km² dengan luas wilayah laut mencapai 523,82 Km². luas wilayah perairan berdasarkan wilayah kewenangan tercantum dalam Tabel 4.7 berikut ini :

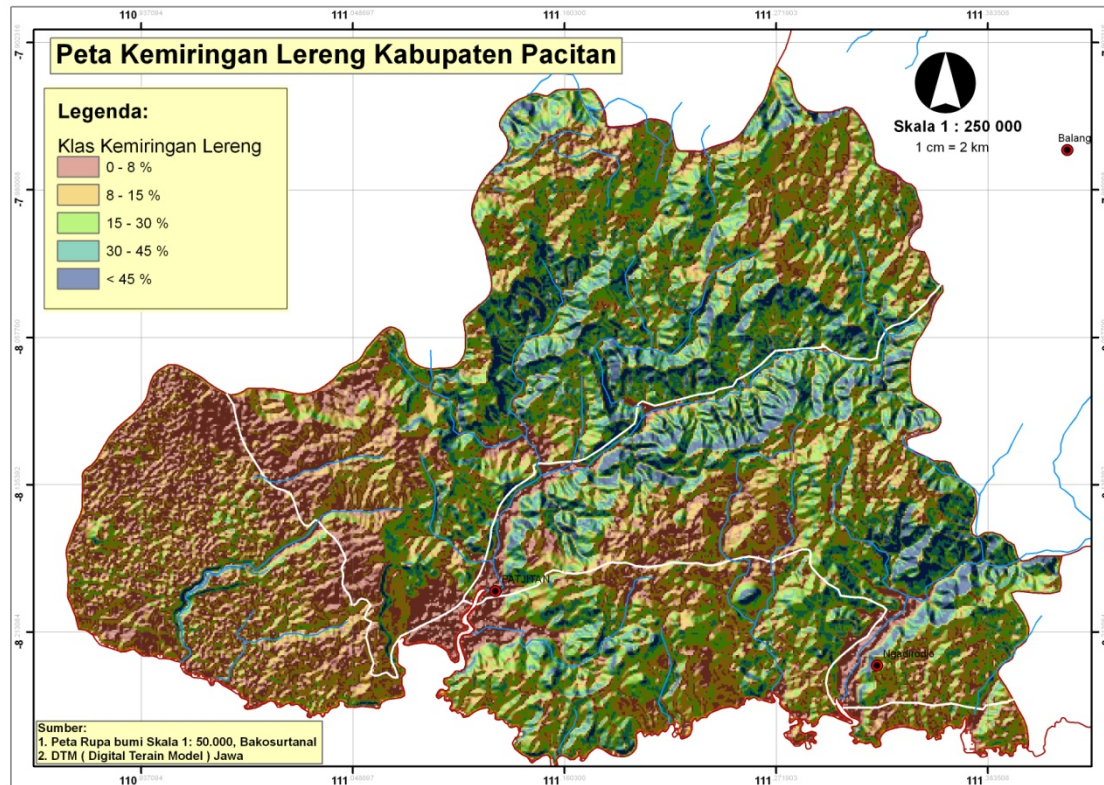
Tabel 4.7
Panjang Pantai Per Kecamatan Berdasarkan Kondisi Pantai

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Panjang	Pantai (Km)
			Curam	Landai
1.	Donorojo	- Sendang	4,1	0
		- Widoro	0,75	1,771
		- Kalak	1,75	0
2.	Pringkuku	- Watukarung	1	2
		- Dersono	1,5	1
		- Candi	1	2,279
		- Jlubang	1	0
		- Poko	2	0
		- Dadapan	4	0
3.	Pacitan	- Kel. Sidoharjo	0,287	1
		- Kel. Ploso	0	0.858
		- Kembang	0,3	0.129
4.	Kebonangung	- Sidomulyo	1,050	1,047
		- Wora-wari	1,970	0,124
		- Katipugal	1,076	1,016
		- Klesem	3,478	1,229
		- Karangnongko	0,953	0,616
		- Kalipelus	1,589	1,549
		- Plumbungan	1,875	1,263
5.	Tulakan	- Jetak	3,593	0
6.	Ngadirojo	- Sidomulyo	2,5	2,9
		- Hadiwarno	3,438	1,7
7.	Sudimoro	- Sumberejo	1,096	1,930
		- Sukorejo	0,895	0,750
		- Peger Lor	2,932	0
		- Peger Kidul	2,885	0,531
7	Kecamatan	26 desa/kel	47,017	23,692

Sumber : Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 2008

Gambar 4.3

Kemiringan Lereng Kabupaten Pacitan



Adapun komoditas yang terdapat di pesisir dan laut Kabupaten Pacitan terdiri dari beberapa jenis :

- a) Ikan pelagis besar, yaitu ikan yang mempunyai habitat di tengah sampai permukaan laut, seperti Tuna, Cangkalang, Tongkol, Tengiri, Marlin dan Lemandang.
- b) Ikan pelagis kecil, ikan yang mempunyai habitat sampai permukaan laut dan pada umumnya berukuran kecil, seperti Kembung, Lemuru, Rebon, Keri, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Layang, Kuniran, Golok-golok, Lencam dan Cumi-cumi.
- c) Ikan demersal besar, yaitu ikan yang mempunyai habitat di dasar laut dan pada umumnya berukuran besar, seperti Cucut, Pari, Tiga Waja, Kakap Merah, Kakap Putih dan Kerapu.
- d) Ikan demersal kecil, yaitu ikan yang mempunyai habitat di dasar laut dan pada umumnya berukuran kecil, seperti Lobster, Layur, Manyung, Sebelah, Bawal, Peperek, Undang, Kurisi dan Pogot.

Berdasarkan data jumlah produksi ikan yang berhasil ditangkap, terlihat adanya fluktuasi produksi dari tahun ke tahun dan Kecamatan Pacitan merupakan

produsen terbesar sepanjang tahun, sedangkan Kecamatan Donorojo adalah produsen terkecil.

Tabel 4.8
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan di
Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Jumlah Produksi (Kg)			
	2005	2006	2007	2008
Donorojo	5.365	1.748	32.803	1.533
Pringkuku	212.115	308.484	326.685	374.561
Pacitan	645.363	489.186	2.155.665	2.434.137
Kebonagung	242.216	430.186	210.771	84.779
Tulakan	52.312	159.358	65.607	117.185
Ngadirojo	326.213	264.089	222.100	307.616
Sudimoro	75.965	217.908	101.030	118.661
Jumlah	1.559.549	1.871.600	3.114.661	3.438.472

Sumber : Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 2008

Jenis ikan hasil tangkapan sangat bervariasi, yang dibedakan menjadi : Ikan Demersal, Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil, *Crustaceae* (Udang). Secara rinci produksi per jenis ikan di Kabupaten Pacitan disebutkan sebagaimana tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan di Kabupaten
Pacitan Tahun 2004 – 2008

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Tuna	-	-	74.231	1.153.236	1.181.905
2	Cakalang	-	-	21.230	556.782	725.847
3	Bawal/Dorang	44.817	67.069	84.030	40.816	3.719
4	Kembung	69.130	90.800	109.837	84.252	5.539
5	Udang Lobster	68.442	23.759	11.133	41.134	28.017
6	Udang Merah	3.629	2.784	6.079	2.176	-
7	Rebon	99.818	28.128	65.002	52.376	90.344
8	Teri	205.036	51.610	96.556	35.070	56.395
9	Tongkol/Abon	356.026	190.478	184.242	163.584	448.314
10	Lemuru	174.330	85.495	90.557	66.737	109.208
11	Tengiri	73.248	77.485	51.885	63.320	192.337
12	Layur	325.796	117.454	192.523	133.094	120.935

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)				
		2004	2005	2006	2007	2008
13	Julung-julung	13.748	54.444	64.593	24.920	22.639
14	Tiga Waja	46.909	64.292	79.119	41.050	22.444
15	Ekor Kuning	975	25.940	44.996	25.395	9.359
16	Ikan Kue	11.951	62.178	55.439	27.520	183
17	Petek	30.573	14.503	20.077	-	-
18	Manyung	107.901	94.340	140.540	95.063	12.904
19	Kurau	31.874	52.242	46.253	-	-
20	Cucut/Kelong	69.204	113.610	123.507	68.833	33.276
21	Pari	74.350	90.302	94.785	45.860	9.556
22	Kakap	23.670	59.812	25.642	38.397	19.053
23	Remang	19.511	11.531	14.007	-	-
24	Kerapu	20.125	15.112	27.088	12.567	728
25	Layang	-	-	-	24.835	10.879
26	Marlin	-	-	-	24.286	834
27	Sebelah	-	-	-	24.316	1.183
28	Lemadang	-	-	-	16.852	4.555
29	Kuniran	-	-	-	17.661	40.635
30	Golok-golok	-	-	-	14.900	-
31	Udang Jerbung	-	-	-	8.067	3.087
32	Lencam	-	-	-	7.688	16
33	Cumi-cumi	-	-	-	1.631	147
34	Peperek	-	-	-	1.632	2.965
35	Kurisi	-	-	-	974	1.093
36	Pogot	-	-	-	159	-
37	Rumput Laut	-	-	-	15.420	1.637
38	Lain-lain	83.755	121.293	164.249	184.238	278.738
Jumlah		1.934.702	1559.549	1.871.600	3.114.661	3.438.472

Sumber : Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

2) Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Selain berorientasi pada perikanan tangkap konsepsi minapolitan memasukkan pula sektor perikanan budidaya sebagai pendukung sektor inti (perikanan tangkap). Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pacitan, pada tahun 2010 hasil perikanan budidaya kabupaten Pacitan adalah sebesar 362 ton dengan jenis komoditas seperti; udang, rumput laut, lele, nila, mas, gurame, dan lain-lain. Dengan luas kolam ikan sebesar 29 Ha, perairan umum seluas 1 Ha, tambak seluas 7 Ha, serta budidaya laut seluas 4 Ha. Adapun lokasi budidaya ditunjukkan melalui analisis GIS menggunakan citra satelit dalam gambar 4.2 sebagai berikut;

Gambar 4.4
Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Sumber: data diolah

Pembudidayaan ikan yang dilakukan masyarakat sebagian besar memanfaatkan lahan pekarangan dengan membuat kolam ikan baik sendiri maupun berkelompok, pada umumnya mereka tergabung dalam kelompok petani ikan dibawah binaan dinas perikanan Pacitan.

3) Kawasan Minapolitan Pengolahan Hasil Perikanan

Penanganan pasca panen hasil perikanan masih jarang dilakukan di Kabupaten Pacitan. Produksi ikan hasil tangkapan nelayan kebanyakan dijual langsung dalam bentuk segar. Pasar ikan di sekitar tempat pendaratan ikan belum tersedia, yang ada hanyalah bakul ikan yang membeli di TPI kemudian dijual kepada pedagang pengepul atau di pasar. Selanjutnya pengepul akan menjualnya dalam keadaan segar ke daerah lain seperti Surabaya, Tuban, Kediri, Malang, Jember, Semarang dan Cilacap. Jenis-jenis hasil laut yang biasa dipasarkan meliputi lobster, bawal, manyung, remang, tuna, tongkol dan juga rumput laut. Pengolahan hasil perikanan di kelola dalam skala kecil (rumah tangga) dengan teknologi yang sangat terbatas, sehingga produksi yang

dihasilkan pun masih sangat kecil. Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pacitan, saat ini baru terdapat 140 home industri yang bergerak dalam sektor pengolahan hasil perikanan yang memproduksi 5 ton terasi dan abon dalam setahun, serta pindang sebesar 1,5 ton dalam setahun. Hasil analisis GIS mengenai lokasi pengolahan hasil perikanan ditunjukkan dalam gambar 4.3 sebagai berikut;

Gambar 4.3
Kawasan Minapolitan Pengolahan Hasil Perikanan

Sumber: data diolah

Penjualan hasil ini belum bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan tentu saja dalam kerangka peningkatan PAD.

4.2. ANALISIS PENETAPAN KOMODITAS DAN WILAYAH SEKTOR PERIKANAN TANGKAP ANDALAN DAN POTENSIAL KABUPATEN PACITAN

Analisis deskriptif kuantitatif pada sub bab ini akan membahas tentang analisis penetapan komoditas basis sektor perikanan di Kabupaten Pacitan. Analisis deskriptif kuantitatif ini dibatasi pada sub sektor perikanan tangkap. Penetapan komoditas andalan dan potensial dilakukan dengan menggunakan analisis *Kontribusi Sektoral (K)*, definisi Komoditas potensial pada sebuah daerah adalah komoditas yang memiliki nilai $K > 1\%$ dibandingkan komoditas lain di suatu wilayah. Hasil perhitungan *Kontribusi Sektoral (K)* komoditas perikanan tangkap Kabupaten Pacitan dilaporkan pada Tabel IV.1. Komoditas unggulan perlu ditetapkan dalam rangka penetapan komponen diversifikasi usaha sektor perikanan di Kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan.

4.2.1. Analisis Kontribusi Sektoral komoditas Perikanan Tangkap Pacitan

Analisis *Kontribusi Sektoral (K)* juga dapat digunakan dalam menetapkan lokasi yang potensial sebagai daerah yang berfungsi untuk mendukung produksi pada zona inti minapolitan di Kabupaten Pacitan, hasil analisis ini diperlukan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan yang perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Kabupten Pacitian. Hasil perhitungan ditunjukkan dalam Tabel 4.10.

TABEL 4.10

Hasil Perhitungan Kontribusi Komoditas Sektor Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan

No	Jenis Ikan	Hasil Produksi (Ton)	Nilai Kontribusi	Kriteria
1	Tuna	1.181.905	34,4%	Andalan
2	Cakalang	725.847	21,1%	Andalan
5	Udang Lobster	28.017	0,8%	Potensial
7	Rebon	90.344	2,6%	Andalan
8	Teri	56.395	2,0%	Andalan
9	Tongkol	448.314	13,0%	Andalan
10	Lemuru	109.208	3,2%	Andalan
11	Tengiri	192.337	5,6%	Andalan

No	Jenis Ikan	Hasil Produksi (Ton)	Nilai Kontribusi	Kriteria
12	Layur	120.935	3,5%	Andalan
13	Julung-julung	22.639	0,7%	Potensial
29	Kuniran	40.635	1,2%	Potensial
38	Lain-lain	278.738	8,1%	Potensial
Jumlah		3.438.472	100%	

Sumber: BPS diolah

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan sektor perikanan tangkap dalam arti luas, yaitu faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis antara lain meliputi iklim (musim), gelombang laut, arus laut, dan kondisi pantai sangat menentukan dalam kuantitas komoditas perikanan tangkap yang akan dikembangkan. Faktor non teknis meliputi teknologi, perilaku dan kemampuan nelayan, modal, pasar, serta manajemen.

4.2.1. Komoditas Perikanan Tangkap Andalan

Dari hasil analisis kontribusi sektoral komoditas perikanan kabupaten Pacitan pada Tabel 4.10, dapat kita lihat komoditas perikanan tangkap yang merupakan andalan bagi Kabupaten Pacitan didominasi dari jenis ikan palagis besar, berturut-turut adalah ikan tuna dengan nilai kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 34% dari total jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan pada tahun 2008, diikuti oleh ikan cakalang dengan omzet produksi sebesar 21%, kemudian ikan tongkol sebesar 13% dan ikan tenggiri sebesar 6%. Sedangkan dari jenis ikan pelagis kecil, ikan lemuru, teri dan rebon menjadi komoditas andalan bagi Kabupaten Pacitan dengan nilai kontribusi sebesar 3%. Komoditas andalan lain adalah ikan layur dari jenis ikan demersal kecil dengan nilai kontribusi sebesar 4%.

4.2.2. Komoditas Perikanan Tangkap Potensial

Berdasarkan Tabel 4.9 komoditas potensial perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan di Kabupaten Pacitan cukup beragam, mulai dari ikan pelagis kecil hingga, ikan demersal besar maupun kecil dengan nilai produksi antara 20.000 hingga 30.000 ton pertahun. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: jenis ikan pelagis kecil yaitu: Lemuru, Teri, Julung-julung, dan Kuniran. Dan Ikan demersal kecil, yang menjadi komoditas potensial Kabupaten Pacitan adalah Lobster.

4.2.2. Analisis Pertumbuhan Komoditi Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan

Dalam pengembangan bisnis sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan, kuantitas hasil tangkapan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka terjaminnya bahan baku, selain itu tangkapan dari nelayan merupakan komoditas hulu yang harus *sustainable* dari waktu ke waktu. Untuk itu diperlukan analisis pertumbuhan produk hasil perikanan tangkap sebagai dasar penetapan komoditas yang *sustainable* di kabupaten Pacitan. Hasil analisis pertumbuhan hasil perikanan tangkap Kabupaten Pacitan di sajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11

Hasil Analisis Pertumbuhan Komoditi Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan

No	Jenis Komoditas	Hasil Produksi		GROWTH	KRITERIA
		2007	2008		
1	Tuna	1.153.236	1.181.905	2%	Rendah
2	Cakalang	556.782	725.847	30%	Rendah
7	Rebon	52.376	90.344	72%	Sedang
8	Teri	35.070	56.395	61%	Sedang
9	Tongkol	163.584	448.314	174%	Tinggi
10	Lemuru	66.737	109.208	64%	Sedang
11	Tengiri	63.320	192.337	204%	Tinggi
29	Kuniran	17.661	40.635	130%	Tinggi
34	Peperek	1.632	2.965	82%	Sedang
35	Kurisi	974	1.093	12%	Rendah
38	Lain-lain	184.238	278.738	51%	Sedang
Jumlah		3.114.661	3.438.472		

Sumber: *Dinas Perikanan dan Kelautan Pacitan diolah*

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan diketahui bahwa komoditas ikan tengiri merupakan komoditas yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya dengan nilai 204%, kemudian diikuti oleh ikan tongkol, kuniran, peperek, rebon, lemuru, teri dan kurisi.

4.2.3. Induksi Hasil Analisis Komoditas Unggulan Kabupaten Pacitan

Induksi hasil analisis komoditas unggulan di Kabupaten Pacitan, berdasarkan analisis kontribusi sektoral dan analisis pertumbuhan hasil produksi pada perikanan dapat dilihat dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12
Induksi Hasil Analisis

No	Jenis Komoditas	Hasil Produksi (Ton)		Nilai Kontribusi	Kriteria	Growth	Kriteria Pertumbuhan
		2007	2008	2008			
1	Tuna	1.153.236	1.181.905	34,4%	Andalan	2%	Rendah
2	Cakalang	556.782	725.847	21,1%	Andalan	30%	Rendah
3	Rebon	52.376	90.344	2,6%	Andalan	72%	Sedang
4	Teri	35.070	56.395	2,0%	Andalan	61%	Sedang
5	Tongkol	163.584	448.314	13,0%	Andalan	174%	Tinggi
6	Lemuru	66.737	109.208	3,2%	Andalan	64%	Sedang
7	Tengiri	63.320	192.337	5,6%	Andalan	204%	Tinggi
8	Kuniran	17.661	40.635	1,2%	Potensial	130%	Tinggi
9	Lain-lain	184.238	278.738	8,1%	Potensial	51%	Sedang
Jumlah		3.114.661	3.438.472				

Dari hasil analisis induksi berdasarkan pertumbuhan kuantitas hasil produksi maupun nilai kontribusinya, sektor perikanan tangkap Kabupaten Pacitan memiliki 9 komoditas unggulan, sedangkan yang komoditas yang memiliki kriteria paling unggul baik dari kuantitas maupun tingkat pertumbuhan hasil produksinya adalah pada jenis ikan tongkol. Berdasarkan analisis ini maka kesembilan sektor hulu inilah yang layak dikembangkan hingga ke sektor hilir.

4.3. Analisis Kewilayahan

1) *Analisis Wilayah Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap Kabupaten Pacitan*

Pada sub bab ini akan menguraikan kawasan-kawasan yang diprioritaskan sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan tangkap. Untuk menentukan kawasan yang menjadi prioritas diperlukan analisis wilayah berdasarkan kontribusinya terhadap total produksi di Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan adalah jumlah tangkapan nelayan yang berhasil didaratkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pacitan. Analisis kontribusi wilayah dapat dilihat dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13
Analisis Kontribusi (K) Perikanan Tangkap Kab Pacitan
Berdasarkan Daerah Tangkapan

Kecamatan	$\sum y_i$	$\sum Y_t$	$K = \sum y_i / \sum Y_t \times 100$
Donorojo	1.533	3.438.472	0,04%
Pringkuku	374.561	3.438.472	10,89%
Pacitan	2.434.137	3.438.472	70,79%
Kebonagung	84.779	3.438.472	2,47%
Tulakan	117.185	3.438.472	3,41%
Ngadirojo	307.616	3.438.472	8,95%
Sudimoro	118661	3.438.472	3,45%
			100%

Sumber: Profil Kelautan dan Perikanan Pacitan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan masih didominasi Kecamatan Pacitan dengan PPP Tamperan sebagai produsen sektor perikanan tangkap terbesar. Diikuti oleh Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Ngadirojo.

2) Kondisi Eksisting Kawasan Pembentuk Minapolitan Pacitan

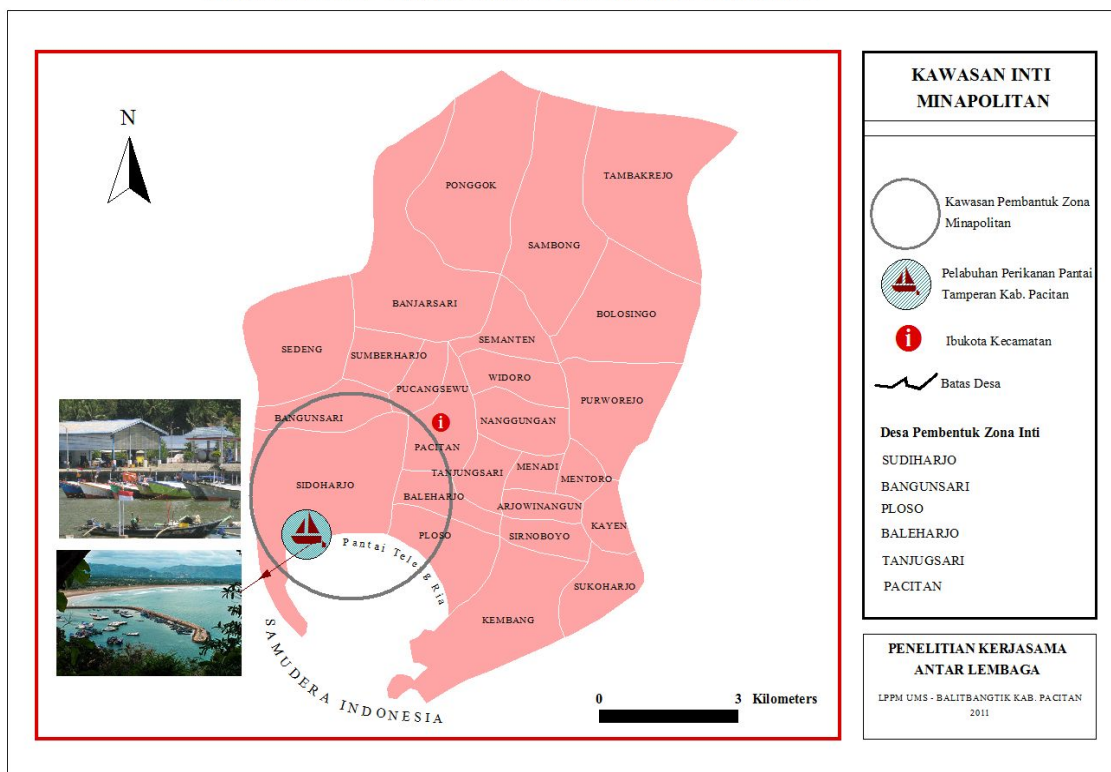
Berdasarkan SK Bupati Pacitan nomor 188.45/25/408.21/2011 dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pacitan yang termaktub dalam Perda Kab. Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, menetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan sebagai kawasan inti Minapolitan sedangkan kawasan pendukung PPP Tamperan yang meliputi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Pantai Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo dan TPI Pantai Watukarung Kecamatan Pringkuku. Hal ini selaras dengan hasil analisis pada tabel 4.13 yang mengindikasikan kebijakan penetapan kawasan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan kondisi dilapangan.

A. Analisis Suprastruktur Kawasan Minapolitan Pacitan

Berdasarkan SK Bupati Pacitan dengan nomor 188.45/25/408.21/2011, kawasan inti minapolitan pacitan ditetapkan di PPP Tamperan, PPP Tamperan terletak di Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan, dengan koordinat antara 8°13'38"S dan 111°4'29"E, merupakan kawasan yang sangat strategis dalam pengembangan sektor perikanan tangkap, karena kawasan ini berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, dengan

kondisi pantai yang dilindungi oleh teluk alami dan pantai yang relatif landai serta gelombang laut yang relatif sedang. Kecamatan Pacitan memiliki tiga wilayah pesisir seperti ditunjukkan dalam gambar 4.5, wilayah ini merupakan pembentuk kawasan inti Minapolitan Pacitan.

Gambar 4.5
Zona Inti Pelabuhan Perikanan Pacitan



Kecamatan	Desa/Kelurahan	Panjang	Pantai (Km)
		Curam	Landai
Pacitan	- Kel. Sidoharjo	0,287	1
	- Kel. Ploso	0	0.858
	- Kembang	0,3	0.129

Sebagai pusat kegiatan Minapolitan Pacitan, PPP Tamperan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam produksi perikanan tangkap. Sarana dan prasarana tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.14 dan tabel 4.15.

Tabel 4.14
Fasilitas pada PPP Tamperan

NO	JENIS FASILITAS	LUAS AREA
I	FASILITAS POKOK	
1	Lahan PPP	3,5 Ha
2	Breakwater	765,6 m
3	Dermaga	234 m
4.	Caisson Kolam	6,5 Ha
II.	FASILITAS FUNGSIONAL	
1.	Gedung TPI	
2.	Pabrik Es	720 M ²
3.	Kantor Pelabuhan	-
4.	Kantor	220 M ²
5.	Keamanan	-
6.	Ground Reservoir	35 M ³
7.	Power House	20 M ²
8.	Menara Air	18 M ²
9.	Bengkel	-
10.	SPBN	45 M ²
11.	Gudang Es dan Garam	80 M ²
12.	Pos Jaga	-
13.	Toilet	30 M ²
III.	FASILITAS PENUNJANG	
1.	Pasar Ikan	288 M ²
2.	Rumah	120 M ²
3.	Dinas Kantin	45 M ²
4.	Kantor Koperasi	45 M ²
5.	Musholla	100 M ²
6.	Gedung Pertemuan Nelayan	220 M ²
7.	Tempat Parkir	1 Unit
8.	Plengsengan	270 m'
9.	Bukit Landscape	-
10.	Transit Sheet/ Tempat Pengepakan	-

Tabel 4.15
Data Potensi pada PPP Tamperan

URAIAN	KONDISI TAHUN 2003	KONDISI TAHUN 2008	KONDISI TAHUN 2010
Jumlah Nelayan	1.001 orang	1.094 orang	4.975 orang

URAIAN	KONDISI TAHUN 2003	KONDISI TAHUN 2008	KONDISI TAHUN 2010
Jumlah Armada :			
Jukung	292	32	32
< 10 GT	21	106	156
11 - 30 GT	1	6	250
> 30 GT		1	25
Jumlah Alat Tangkap	7.423	10.283	10.542
Jumlah Bakul/ Pengusaha	7	10	15
Jumlah Pengolah Ikan	11	25	40
Volume Produksi (ton)	534	1.692,179	2.574
Nilai Produksi (Juta)	5.356	14.851,2	22.654
Potensi PAD (Rp)		742.557.463,-	1.500.000.000,-

▪ Permasalahan

Berdasarkan FGD dengan Dinas Perikanan dan Kelautan serta Pengelola PPP Tamperan pada tanggal 23 Juli 2011, beberapa permasalahan pada PPP Tamperan secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Belum ada rencana zonasi dan *site plan existing area*;
- b) Masih minimnya pengoperasian kapal diatas 5 GT, sehingga komoditas ikan yang dapat didaratkan masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang tersedia di Perairan Pacitan;
- c) Kegiatan penangkapan ikan di dominasi oleh nelayan dari luar Pacitan, akibatnya *multiplier* tidak terjadi pada penduduk asli Pacitan;
- d) Belum ada standarisasi kapal ikan;
- e) Saat ini di perairan pacitan hanya terdapat 80 unit rumpon laut dalam, jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan komoditas ikan pelagis besar yang ada di perairan dalam;
- f) Belum adanya upaya pelestarian terhadap komoditas perikanan laut, sehingga di khawatirkan terjadi penurunan jumlah komoditas perikanan laut di Pacitan;
- g) Masih minimnya pengawasan pada perairan Pacitan;

- h) Belum ada peraturan daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan;
- i) Masih rendahnya sumber modal yang dapat diakses oleh nelayan Pacitan;

Selain permasalahan diatas, terdapat pula permasalahan yang berhubungan dengan bisnis sektor perikanan tangkap dan industri perikanan laut di Kabupaten Pacitan. Secara ringkas permasalahan dalam pengembangan dalam bisnis sektor perikanan tangkap dan industri perikanan laut adalah:

- a) Penerapan teknologi kurang bersifat ekonomis dan efisien.
- b) Kurang dapat memanfaatkan bahan-bahan hasil sampingan dari proses produksi.
- c) Kurangnya rekayasa teknologi yang dapat meningkatkan daya dukung hasil produksi.

Selain hal tersebut diatas, dalam rangka mempercepat pengembangan Konsepsi Minapolitan, perlu adanya regulasi yang menyambung Konsepsi Minapolitan di Kabupaten Pacitan dukungan sektor penunjang dalam bentuk sarana dan prasarana fisik perlu ditingkatkan dan diperluas sesuai dengan kapasitas dan kuantitas yang telah diperhitungkan dengan cermat. Sedangkan keterpaduan perencanaan harus mengacu pada peraturan yang telah ada, pelaksanaannya harus ditingkatkan serta diawasi dengan ketat serta melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB V

MODEL PENGEMBANGAN MINAPOLITAN KABUPATEN PACITAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL

5.1. KONSEP DASAR PERENCANAAN KAWASAN MINAPOLITAN PACITAN

5.1.1. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi Kawasan Minapolitan Pacitan terutama adalah minabisnis. Kegiatan minabisnis sebagai suatu sistem, mewadahi setiap sub sistemnya ke dalam hirarki kawasan. Kegiatan produksi berdasarkan kontribusi hasil produksi seperti halnya tercantum dalam tabel IV.4, terkonsentrasi pada kawasan inti Minapolitan (PPP Tamperan) dan kawasan pendukungnya; sedangkan sub sistem hilir, pelayanan internal dan jasa Kawasan Pendukung dan Kawasan Pengembangan Minapolitan; kemudian berdasarkan posisi strategik yang meliputi aksesibilitas dan fungsional PPP Tamperan di Kecamatan Pacitan diorientasikan sebagai lokasi distribusi utama dengan fungsi sebagai *external transaction place* (lokasi transaksi dengan pihak luar kawasan). Kegiatan sub sistem minabisnis hulu didesain dengan konsep menyebar pada zona-zona strategis yang terbentuk karena adanya *intersection* sirkum pelayanan sebagai pendukung kawasan inti (*isotomi* dan *isodarpan*). Zona strategis tersebut merupakan lokasi-lokasi yang secara geo-strategis efektif untuk melayani desa-desa *hinterland* dan Kawasan Inti Minapolitan Pacitan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sarana produksi dan lain sebagainya. Kecuali zona strategis untuk kegiatan sub sistem hulu minabisnis, juga didesain koridor yaitu lokasi masuk-keluar (in-out) kawasan di bagian selatan-utara-barat-timur Kawasan Minapolitan Pacitan. Zona strategis dan koridor tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1, tentang Struktur Tata Ruang Kawasan Minapolitan Pacitan.

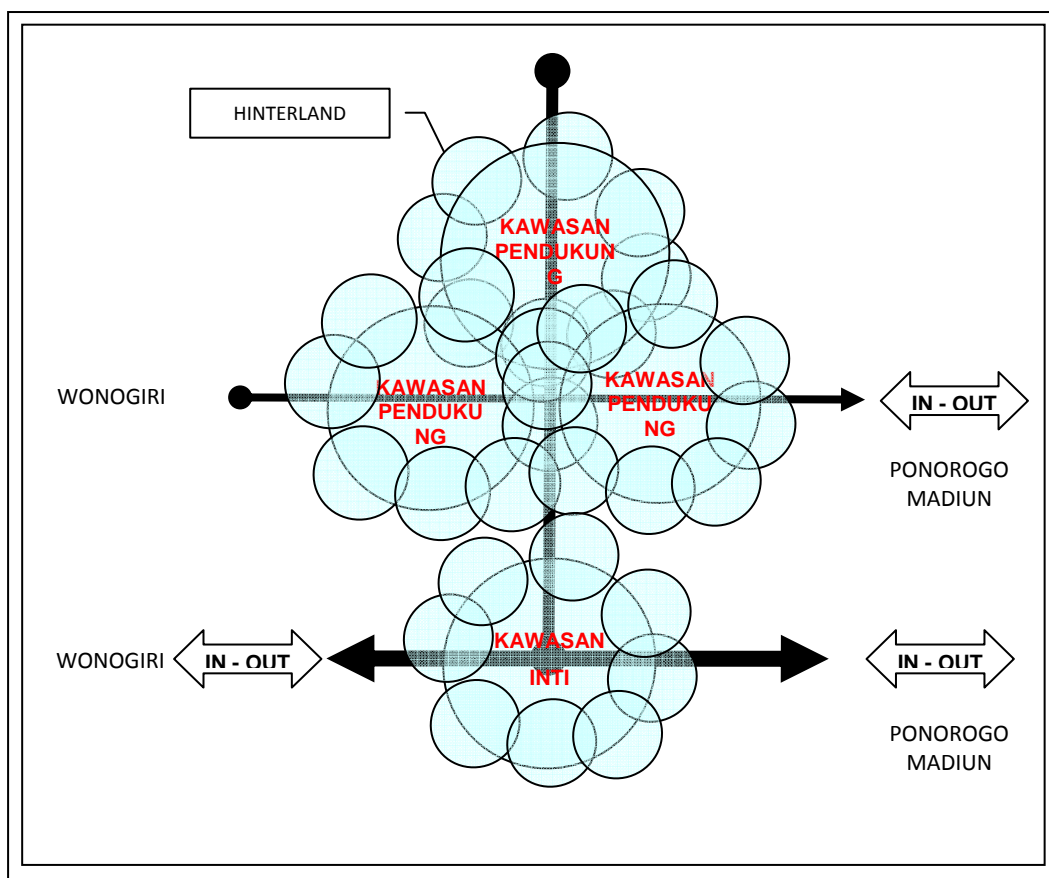
5.1.2. Kategori Produk

Kawasan Minapolitan Pacitan merupakan *site-site on farm* yang memproduksi berbagai produk biotis perikanan dan hasil laut, baik tangkapan, budidaya maupun hasil laut lainnya seperti rumput laut dan kerang. Sistem produksi kawasan mengacu pada kelestarian lingkungan hidup yang tetap memperhatikan dayaguna dan hasil guna yang tinggi. Konsep sistem produksi perikanan dalam arti luas tersebut didefinisikan sebagai:

“a biological product process with responsibility on the energy and residu cyclics” (suatu proses produksi biotis yang bertanggung jawab terhadap siklus energi dan residu). Produksi kawasan dapat dikategorikan sebagai produk primer (hasil panen) dan sekunder (hasil panen yang telah diolah). Konsep sistem minabisnis dengan produk terdiversifikasi vertikal yang diterapkan di Kawasan Minapolitan Pacitan, mengarahkan bahwa suatu produk primer mutlak membutuhkan peningkatan nilai tambah melalui minaindustri. Produk unggulan berdasarkan hasil induksi analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan produk pada Tabel IV.3, kecuali dapat diperdagangkan dalam bentuk produk primer perlu ditingkatkan nilai tambahnya dalam minaindustri baik dalam skala *home* industri maupun agroindustri skala kecil-menengah.

Gambar 5.1.

Konsep Struktur Tata Ruang Kawasan Minapolitan Pacitan



5.1.3. Arah Aliran Produk Kawasan Minapolitan Pacitan

Arah aliran produk Kawasan Minapolitan Pacitan mengarah ke dalam kawasan dan ke luar kawasan. Aliran kedalam adalah melalui Tempat Pelelangan Ikan di desa-

desa pendaratan ikan di pesisir Pantai Kab. Pacitan, dari desa hasil panen nelayan tersebut didistribusikan ke kawasan pendukung Minapolitan terdekat, kemudian diolah dalam minaindustri skala kecil/menengah atau dijual oleh pedagang pengumpul ke sub terminal minabisnis di PPP Tamperan.

Lokasi/zona strategis untuk perdagangan produk primer maupun sekunder terletak di Kawasan Minapolitan Pacitan di Tamperan yang merupakan pusat distribusi sekaligus berdekatan dengan kawasan Wisata Pantai Teleng Ria.

5.1.4. Sistem dan Skala Produksi

Sistem produksi yang dilakukan di Kawasan Minapolitan Pacitan dicanangkan dengan konsep produk terdiversifikasi vertikal (produk primer diolah menjadi beberapa produk sekunder dengan berorientasi pada pasar sasaran).

Berkaitan dengan sistem produksi terdiversifikasi vertikal, maka dalam konsep minabisnis Kawasan Minapolitan Pacitan sistem produksi di bagian hulu-budidaya dan hilir harus memiliki skala produksi yang relevan. Untuk itu pada hirarki kawasan dengan fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan minabisnis dibutuhkan penetapan skala produksi yang relevan. Skala *home* industri terdapat di masing-masing *hinterland*, skala minaindustri kecil/menengah di Kawasan Pendukung, sedangkan skala industrimina menengah/besar terdapat di Kawasan Inti Minapolitan. Industrimina kecil atau *home* industri adalah kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta modal di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Industrimina menengah adalah kegiatan pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan teknologi madya serta modal di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun di bawah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Industrimina besar adalah kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan teknologi mutakhir/canggih serta modal lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

5.2. KONSEP MINABISNIS DALAM KAWASAN MINAPOLITAN PACITAN

Konsep Minabisnis dalam dalam Kawasan Minapolitan Pacitan perlu menggunakan Konsep Keterpaduan Vertikal dan Keterpaduan Horisontal dengan Sistem Pengembangan Perikanan Berbasis Komoditas. Tingkat keeratan hubungan dalam setiap komponen yang terkait dalam sistem minabisnis di Kawasan Minapolitan

akan menentukan kinerja pengelolaan dan pengusaha kawasan. Kinerja tersebut akan sangat tergantung pada terselenggaranya integrasi sistem minabisnis baik vertikal maupun horisontal.

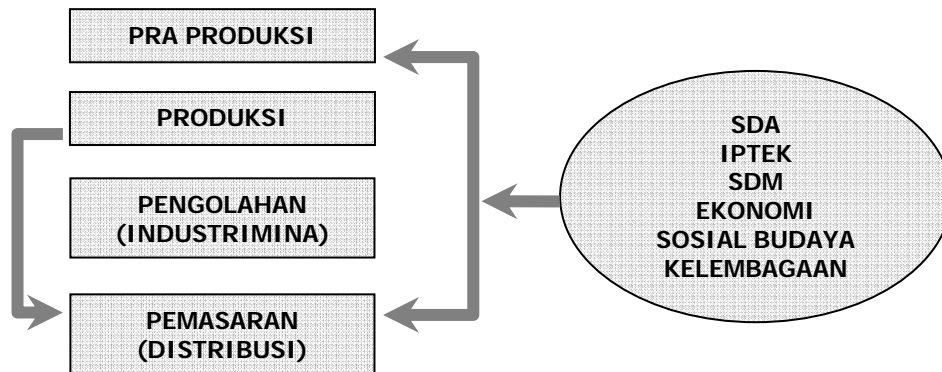
5.3.1. Konsep Keterpaduan Vertikal

Keterpaduan vertikal diartikan sebagai kegiatan pembinaan terhadap pengembangan suatu komoditas yang diberi prioritas mulai dari kegiatan pra produksi atau pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pengadaan sarana produksi, produksi (budidaya, penangkapan, pengolahan), penanganan pasca panen dan industrimina, serta pemasaran dan distribusi. Tahap-tahap kegiatan tersebut merupakan subsistem dalam rangkaian minabisnis. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada pentahapan tersebut antara lain potensi SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), keadaan ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan kondisi kelembagaan. Dalam keterpaduan vertikal dituntut adanya kesepakatan dari instansi terkait untuk memberikan prioritas atas komoditas yang akan dikembangkan pada suatu wilayah serta secara konsekuen membangun sistem pelayanan yang diperlukan untuk pembangunan komoditas tersebut. Instansi terkait tidak hanya pada lingkup sektor pertanian atau dengan kata lain bersifat lintas sektor.

Pengembangan industrimina akan menjadi motor penggerak perluasan peluang usaha dan kerja bagi masyarakat desa pesisir yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, sehingga nilai tambah dari produk yang dikembangkan dapat dinikmati mereka. Karena itu penyediaan dan pengadaan teknologi industrimina sangat diperlukan. Pelaku ekonomi pedesaan dan pengusaha (BUMN, Swasta, Koperasi) dapat memberikan dukungan dalam bentuk kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Demikian pula pengadaan fasilitas pemasaran produk perlu dikembangkan. Setiap kegiatan atau setiap komponen kegiatan dalam rangka terjalannya keterpaduan vertikal (minabisnis terintegrasi vertikal) harus didasari dengan *commitment* yang tinggi. *Commitment* tersebut di atas sebaiknya secara profesional diwujudkan dalam bentuk naskah kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) antar komponen dalam keterpaduan vertikal. Konsep keterpaduan vertikal disajikan pada

Gambar 5.2.

Konsep Keterpaduan Vertikal Antar Subsistem Minabisnis



Selanjutnya, untuk memudahkan kajian dan pemahaman konsep integrasi vertikal dalam sistem minabisnis Kawasan Minapolitan Pacitan, dapat dicermati bagan pada Gambar 5.3. Pada gambar tersebut disajikan secara detail runtutan keterkaitan antar kegiatan setiap komponen dalam keterpaduan sistem. Konsep sistem minabisnis terintegrasi vertikal, mengkaitkan komponen sistem atau pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut, mulai dari produsen atau penyedia *input*/sarana produksi hasil perikanan, distributor *input*/sarana produksi, pedagang pengumpul, pedagang besar, usaha pengolahan hasil perikanan (industrimina), pedagang pengecer, sampai dengan konsumen domestik dan luar negeri. Arah panah ke atas menunjukkan aliran produk/barang dan sebaliknya arah panah ke bawah menunjukkan aliran uang atau nilai produk/barang. Di luar sistem aliran produk dan uang tersebut terdapat fasilitator dari berbagai lembaga pendukung untuk memperlancar bekerjanya atau berjalannya mekanisme sistem agribisnis secara vertikal yang terpadu. Lembaga-lembaga pendukung tersebut adalah pemerintah, edukator, peneliti, dan masyarakat.

Integrasi vertikal hanya dapat terselenggarakan apabila terdapat hubungan yang saling menguntungkan secara proporsional dan saling mendukung antar pelaku dalam sistem minabisnis secara vertikal tersebut. Keterkaitan yang saling menguntungkan secara proporsional tersebut merupakan pondasi yang kuat untuk membangun integrasi vertikal karena terdapatnya jaminan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan para pelaku. Namun demikian, keterkaitan yang saling mendukung tidak kalah pentingnya dalam menegakkan sistem integrasi vertikal tersebut, karena kekuatan sinergis yang terjadi

dalam berbagai kegiatan akan diperoleh ketika terjadi perhubungan yang semakin kuat dengan semakin tingginya kinerja pihak-pihak yang bekerjasama dalam sistem tersebut.

GAMBAR 5.3

Konsep Integrasi Vertikal Sistem Minabisnis

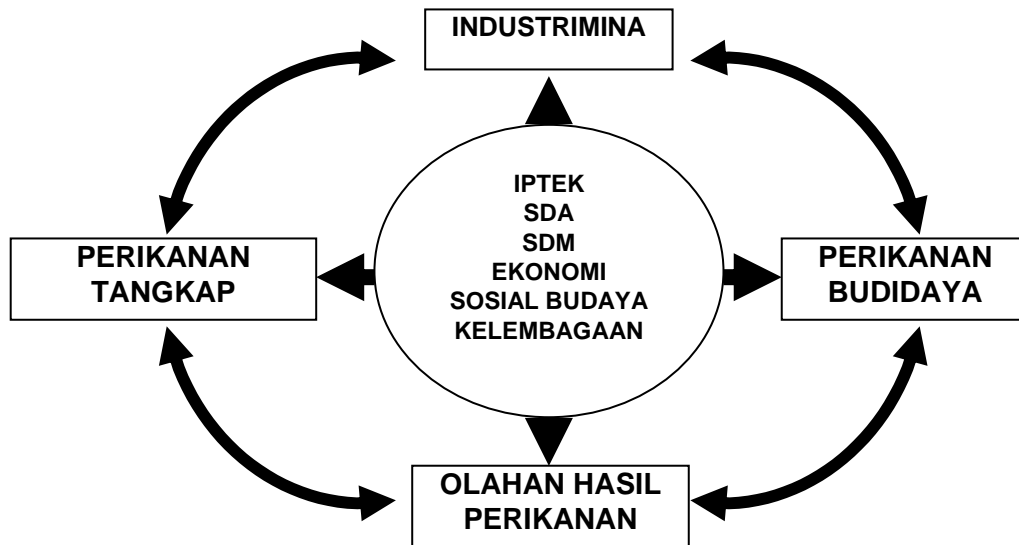


5.3.2. Konsep Keterpaduan Horisontal

Secara horisontal, keterpaduan dalam usaha perikanan (minabisnis) berupa keterpaduan antar sub sektor dalam sektor perikanan, yang sebagaimana telah diketahui bahwa antar sub sektor tersebut dapat saling mendukung dalam terciptanya nilai tambah hasil perikanan. Seperti halnya keterpaduan vertikal, keterpaduan horisontal juga dipengaruhi oleh faktor ilmu pengetahuan teknologi, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kelembagaan yang ada. Secara skematis keterpaduan tersebut disajikan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4.

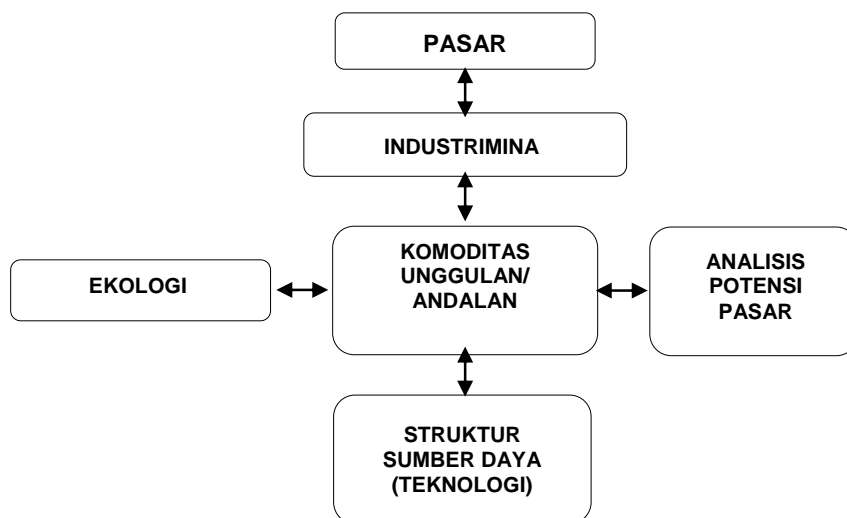
Konsep Keterpaduan Horisontal Minabisnis Kawasan Minapolitan Pacitan



Konsep keterpaduan diharapkan antara lain untuk pemberian arah pencapaian tingkat efisiensi yang tinggi dengan pemanfaatan sumber daya (dana, tenaga kerja, sarana produksi, dll), serta adanya kinerja kegiatan antar sub sektor dengan sektor terkait. Efisiensi dapat ditingkatkan karena hasil atau limbah dari satu sistem produksi dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi lain. Hasil atau limbah sistem produksi yang semula tidak/belum/kurang dimanfaatkan dapat dijadikan masukan untuk sistem produksi lain. Integrasi keterpaduan vertikal dan horisontal disajikan pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5.

Konsep Keterpaduan Vertikal Dan Horisontal Minabisnis Kawasan Minapolitan Pacitan



Keterpaduan vertikal dan keterpaduan horisontal diintegrasikan dengan pendekatan lintas wilayah, lintas sektoral dan lintas kegiatan dengan pertimbangan daya dukung sumber daya wilayah di Kawasan Minapolitan Pacitan (KMP), kedua pendekatan diharapkan dapat dihasilkan suatu bentuk kegiatan pengembangan produk yang secara teknis dapat segera diimplementasikan, secara ekonomis menguntungkan (pendapatan petani dapat ditingkatkan dan berpeluang terhadap minat investor), serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat.

Setiap sub sektor atau dalam keterpaduan antar sub sektor selalu perlu diperhatikan aspek konservasi dan *sustainability* sebagai salah satu pertimbangan implementasi kegiatan yang disarankan secara terintegrasi. Usaha-usaha tersebut diharapkan akan dihasilkan suatu satuan kegiatan produksi atau suatu sistem produksi yang berkelanjutan dan tidak akan merusak daya dukung lingkungan. Penetapan komoditas unggulan pada Kawasan Minapolitan sebaiknya diikuti dengan penetapan komoditas-komoditas lain agar diversifikasi produk daerah memiliki ragam sesuai dengan dinamika pasar. Ragam tersebut juga berguna untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan tersebut (*sustainable*).

5.3. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PACITAN

Sebagai suatu sistem kegiatan ekonomi, kegiatan minabisnis terbagi menjadi tiga sub sistem yang saling terkait satu sama lain. Sub sistem tersebut adalah sub sistem minabisnis hulu, sub sistem minabisnis hilir dan sub sistem minabisnis budidaya (pengolahan).

5.3.1. Konsep Pengembangan Sub Sistem Minabisnis Hulu

Kegiatan pengembangan yang mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan, antara lain adalah penyediaan sarana produksi sektor perikanan, penyediaan infrastruktur, dan penyediaan alat mesin pendukung.

Penyediaan sarana produksi perikanan sebagai pendukung pengembangan kegiatan minabisnis adalah penyediaan ataupun penyempurnaan kolam labuh pada tempat-tempat pendaratan ikan di wilayah pesisir Pantai Pacitan, bengkel kapal, menara suar, pengadaan kapal diatas 5 GT, penambahan rumpon, dan pengadaan pabrik es sebagai bahan dasar dalam pengawetan ikan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah harus melibatkan masyarakat setempat agar tidak terjadi permasalahan dimasa mendatang.

Terkait sumber daya ikan, dalam orientasi lapangan ditemukan terjadinya *gap* yang luar biasa dimana pada saat panen melimpah harga menjadi sangat murah bahkan tidak mampu menutup operasinal nelayan, untuk itu perlu adanya mekanisme pasar yang dapat mengatur regulasi harga ikan di tingkat nelayan. Oleh karena hal ini Pemerintah perlu membuat KUD Mina. Terkait faktor alam, pada orientasi lapangan ditemukan perahu sering terseret ombak dan hilang di laut hal ini disebabkan oleh akresi pertahun yang besar sehingga berakibat pula pada sulitnya waktu pendaratan maupun waktu melaut, kondisi lain yang terjadi akibat akresi ini adalah, pada waktu pendaratan dan melaut kapal harus ditarik sejauh 300 m menuju ke laut atau ke darat, yang pada akhirnya nelayan harus mengeluarkan biaya operasinal yang besar. Untuk itu Pemerintah harus melakukan riset tentang topografi dan kemiringan serta akibat yang terjadi oleh adanya akresi ini.

Perkembangan teknologi *marine* selalu berkembang setiap saat, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan perlu membuat tim dalam menciptakan pengembangan teknologi perikanan yang dapat memberi manfaat lebih kepada nelayan Pacitan.

5.3.2. Konsep Pengembangan Sub Sistem Minabisnis Budidaya

Berdasarkan keragaman minabisnis Kabupaten Pacitan, maka dibutuhkan konsep konsep minabisnis yang terintegrasi horisontal. Manfaat terbesar dari penyelenggaraan produksi perikanan Pacitan secara terpadu dan menyeluruh biasanya tidak diperoleh hanya melalui teknik pengolahan satu cabang usaha saja, melainkan bersumber pada cabang-cabang usaha lain. Azas kesesuaian (*compatible*) dan saling melengkapi (*complement*) di dalam penerapan berbagai teknik unggulan dalam pengelolaan usaha perikanan yang menghasilkan interaksi positif dan sinergis merupakan landasan utama dalam pengembangan usaha perikanan terpadu.

Diversifikasi usaha sektor perikanan dalam kerangka model usaha sektor perikanan terpadu tentunya harus diarahkan menuju kelestarian komoditas perikanan. Oleh karenanya perhatian perlu dipusatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal yang ada secara efisien. Konsep ini mengacu pada:

- a) Berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengkombinasikan berbagai komponen usaha di sektor perikanan

- b) Berusaha mencapai pemanfaatan input luar apabila dibutuhkan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam ekosistem. Dalam pemanfaatan input luar, perhatian utama diberikan pada maksimasi daur ulang dan minimasi kerusakan lingkungan.
- c) Berusaha menghindari kelebihan maupun kekurangan input maupun output dalam memproduksi. Hal ini mengacu pada konsep subsidi silang, informasi sangat dibutuhkan dalam konsep ini.

Pengembangan usaha perikanan terpadu tidak ditujukan untuk memaksimalkan produksi dalam jangka pendek, tetapi untuk mencapai tingkat produksi yang stabil dan memadai dalam jangka panjang. Beberapa ciri usaha perikanan terpadu antara lain:

- ❖ Sistem produksi sekaligus konservasi;
- ❖ Tidak bersifat eksploitatif tetapi bersifat siklus;
- ❖ *Budget* keharaan berimbang;
- ❖ Input kimia hanya bersifat pelengkap;
- ❖ Optimalisasi pengolahan limbah organik (hasil sampingan);
- ❖ Usaha lintas komoditas namun tetap sesuai dan saling melengkapi.

Pengembangan Kawasan Minapolitan juga diarahkan pada kelestarian ekosistem di dalam ekoregion. Intensifikasi usaha perikanan berorientasi produktivitas, stabilitas berkelanjutan dan pemerataan pendapatan serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pertanian terpadu ditentukan oleh kemampuan dan ketepatan dalam menentukan komoditas, teknik budidaya dan pengembangannya sesuai dengan kondisi lokal spesifik setiap ekoregion, sehingga model minabisnis yang dikembangkan selain dapat memenuhi kriteria produktivitas yang tinggi juga memenuhi kriteria sosio-budaya.

5.3.3. Konsep Sub Sistem Minabisnis Hilir

Pengembangan minabisnis hilir di Kawasan Minapolitan Pacitan tidak mungkin dipisahkan dengan sub sistem hulu dan budidaya. Kebutuhan akan konsep yang sesuai dengan struktur tata ruang Kawasan Minapolitan Pacitan sangat mutlak.

Berdasarkan teori dan konsep pengembangan Kawasan Minapolitan, maka Kawasan Minapolitan Pacitan perlu melakukan pengembangan minabisnis terintegrasi vertikal. Konsep ini berarti merekomendasikan bahwa kegiatan minabisnis hilir atau *downstream* menjadi penggerak utama. Konsep tersebut sangat cocok karena mampu

menampung kegiatan ekonomi dan sesuai dengan struktur tata ruang yang direncanakan bagi Kawasan Minapolitan Pacitan. Kegiatan ekonomi yang berbasis perdagangan komoditas sektor perikanan tersebut berupa *backward and forward linkages* yang mengkait sistem minabisnis hulu-budidaya-hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria, 2010, *Minapolitan dan Minapolitik*, Jakarta (ANTARA News),
<http://www.antaranews.com/berita/1269867347/minapolitan-dan-minapolitik>
- Antara News, 2010, *Target 200 Kawasan Minapolitan*
<http://www.indonesiaeximbank.go.id/Publikasi/LiputanMedia/tabid/82/newsid/424/567/Default.aspx>
- Antara News, 2010, "*Minapolitan*" Untuk Memerangi Kemiskinan"
<http://www.antaranews.com/berita/1270538323/minapolitan-untuk-memerangi-kemiskinan>.
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, 2008, *Penelitian Pemberdayaan UMK Bagi Masyarakat Nelayan Guna Mendukung Pengembangan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Pacitan*.
- Dahuri, Rokhmin, dkk, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Coztanza, R. 1991. *Ecological economics: The Science and Management of Sustainability*. Columbia University Press. New York.
- Depatemen Kelautan dan Perikanan. Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP).
- DKP. 2008. Urgensi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Atrikel on-line Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Haryandi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir di Pantai Timur kabupaten Lampung Selatan*.
<http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/06/pemberdayaan-masyarakatterhadap-pengelolaan-lahan-wilayah-pesisir-dipantaitimur-kabupatenlampung-selatan>
- Timothy Beatly, David J. Bower, dan Anna K. Schwab. 2002. *An Introduction to Coastal Zone Management*. Island Press. Washington, DC.
- Kay, R. dan Alder, J. 1999. *Coastal Management and Planning*. E & FN SPON. New York.
- La, An. 2008. *Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi dan Data Penginderaan Jarak Jauh*.
<http://mbojo.wordpress.com>.
- Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir*. Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34. Surabaya.
http://www.penataanruang.net/taru/makalah/men_prlautpesisir-TTS43.pdf.
- .Wiyana, Adi. 2004. *Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)*. http://rudyc.com/PPS702-ipb/07134/afi_wiyana.htm.

SUMBER LAIN :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.




Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Lampiran

FGD dengan Nelayan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pacitan
23 Juli 2011, Pantai Watukarung, Kec. Pringkuku

<p align="center">Gambar 1 FGD dengan Kepala Kecamatan Watukarung</p>	<p>Temuan</p>
	<p>Kepala desa memberikan informasi bahwa setiap tahun panen ikan tongkol dengan jumlah besar. Permasalahan : harga murah bahkan tidak ada yang membeli. Tidak es untuk menyimpan, sehingga petani memutuskan ikan tongkol yang sampai 10 ton per hari dibiarkan membusuk dan dibuang. Permintaan : 1) Perbaikan pasar, 2) pengadaan pabrik es oleh pemerintah/pabrik</p>
<p align="center">Gambar 2 FGD dengan Kelompok Nelayan Tameng Segoro</p>	
	<p>Pendapat para nelayan: 1) pemerintah menstabilkan harga pasar pada waktu masa panen ikan. Selama ini masa panen ikan susah menjualnya sehingga ikan dibiarkan membusuk dan dibuang karena harga tidakimbang dengan tenaga 2) minta solusi pada waktu panen ikan melimpah. UMS menawarkan dibuat tepung untuk bahan pakan ikan (pellet) dan pakan ternak, tawaran itu disetujui oleh masyarakat , memberikan lapangan kerja ibu – ibu istri nelayan</p>
<p align="center">Gambar 3 Lokasi Pendaratan Kapal</p>	
	<p>1) Perahu sering terseret ombak dan hilang di laut. 2) akresi/tahun besar berakibat sulitnya waktu pendaratan maupun waktu melaut. Pada waktu pendaratan dan mau melaut harus ditarik sejauh 300 m menuju ke laut atau ke darat. Nelayan mengeluarkan biaya yang besar. 3) pemerintah sudah membangun sarana dan pra sarana , namun tidak berfungsi. Solusi yang ditawarkan: perencanaan pengembangan sarana prasarana mohn rakyat dilibatkan, mengingat yang tau situasi dengan periode 50 tahunan adalah masyarakat nelayan/ Watukarung</p>

Gambar 4 Teluk Alami di Pantai Pringkuku	
	<p>Mohon adanya regionalisasi paket wisata di daerah watu karung yang terdiri dari : 1. wilayah tempat ikan warung makan, 2) teluk untuk selancar air, 3) gua karst, 4) budaya sehingga menarik para pengunjung sekaligus dapat memberdayakan masyarakat</p>
Gambar 5 Lokasi Pendaratan Kapal (Lama)	
	<p>Masyarakat nelayan memberikan gambaran Lokasi pendaratan kapal penangkap ikan. Hasil orientasi Lingkungan (aspek morfologi, hidrologi, geomorfologi, litologi dan material laut yang diendapkan) pendapat masyarakat perlu ditindak lanjuti dengan survei mendalam. Bangunan yang ada sudah tertutup pasir akibat endapan gelombang dan angin sehingga tidak berfungsi lagi .</p>
Tempat Pelelangan Ikan Pantai Pringkuku, Kec. Watukarung	
	<p>Permintaan :1). Kestabilan harga pasar, terutama pada waktu musim panen ikan, 2) dilengkapi pabrik es sehingga ikan tidak lekas membusuk 3) lahan untuk warung – warung makan,</p> <p>Tawaran : pengolahan ikan menjadi tepung bahan pelet dan pakan ternak. Masyarakat nelayan sangat setuju. Untuk itu perlu survei mendalam</p>